



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI PARK CHUNG HEE
DALAM INDUSTRIALISASI DI KOREA SELATAN
PERIODE 1961-1979**

SKRIPSI

**SILVI FITRI AYU
NPM 0606103685**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI PARK CHUNG HEE
DALAM INDUSTRIALISASI DI KOREA SELATAN
PERIODE 1961-1979**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

SILVI FITRI AYU

NPM 0606103685

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 12 Juli 2011



Silvi Fitri Ayu

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Silvi Fitri Ayu
NPM : 0606103685
Tanda Tangan : 
Tanggal : 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

nama : Silvi Fitri Ayu
NPM : 0606103685
Program Studi : Bahasa dan Kebudayaan Korea
Judul : Kebijakan-kebijakan Ekonomi Park Chung Hee dalam Industrialisasi di Korea Selatan Periode 1961-1979.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Zaini, M.A. ()
Penguji : Ferry Rustam, M.Si ()
Penguji : Rostineu, M.A. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2011

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta
NIP 196510231990031002

LEMBAR PERSEMBAHAN

힘들고 지쳐있던 나에게...

그리고 항상 내옆에 있어줘서...

이제서야 말하네요...고맙다고...

그리고 그대가 있어 행복하다고... this is for you...

눈물이다 마르기 전에...

또 흘러야 했었던 그 날에...

어둠속에서 내손을 잡아줘서...

아무 말 없이 지켜봐줘서...

고마워요... (슈퍼주니어, 고마워요)

Untuk orang-orang terpenting dalam hidupku...

Terimalah persembahan cinta dariku...

**Buah karyaku selama lebih dari 16 tahun meniti jalan ilmu,
dari kegelapan menuju cahaya...,**

Masterpiece-ku...

Silvi Fitri Ayu (Cipi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...

Dengan segala kerendahan hati, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua itu berkat Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan cinta kasih kepada hambaNya, memberikan kekuatan di kala lemah, kebahagiaan di kala sedih, serta kesejukan hati di setiap helaan nafas sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan-kebijakan Ekonomi Park Chung Hee Dalam Industrialisasi di Korea Selatan Periode 1961-1979” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menyerukan kebaikan kepada seluruh manusia.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, banyak kendala dan hambatan yang saya alami. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Hermansyah, S.Pt dan Agustina tercinta yang mencintaiku tanpa syarat, yang tak pernah sedikit pun meragukanku, yang selalu mempercayaiiku, yang selalu tertawa bersamaku di kala senang, yang selalu membelaiku di kala sedih, yang selalu berada di sisiku dalam keadaan apapun. Terima kasih atas cinta yang kuterima selama ini. Terima kasih karena telah menjadi dua orang terhebat dalam hidupku. Dua orang yang sangat luar biasa! Aku sangat bersyukur atas anugerah ini. Alhamdulillah. Untuk kakak-kakakku sekaligus sahabat dan penyemangatku, Siska Oktavia, SKM dan Henni Gusnia, ST yang tak bosan-bosannya memberikan dukungan dan semangat.
2. Zaini, M.A selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbingsaya melalui saran dan kritik yang terus memotivasi saya untuk terus menulis dengan lebih baik. Terima kasih banyak, Pak.
3. Ferry Rustam, M.Si dan Rostineu, M.A selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk membaca dan memberikan saran serta masukan yang sangat berharga atas skripsi ini. Terima kasih.
4. Ibu Christine T. Bachrun, selaku Pembimbing Akademik saya. Terimakasih banyak atas bimbingan serta dukungannya selama ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, baik dosen tetap maupun dosen tamu yang masih berada di Indonesia

ataupun telah kembali pulang ke Korea Selatan yang memberikan banyak ilmu, nasihat, dan bimbingan selama saya kuliah di Program Studi Korea. Rasa terima kasih yang amat sangat saya persembahkan kepada dosen-dosen saya tercinta atas ilmu, nasihat, bimbingan, dan doanya. atas ilmu yang diberikan kepada saya selama ini.

6. Teman-teman Program Studi Korea angkatan 2006, terutama yang turut memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berarti, Sarah "Sardot", Putu "Pete", Dara, Aztwa, Nesya, Leo "Gori", Nadia "Ucil", Adit, Mayung dan khususnya untuk sahabatku Riri, Shaskia "Chaki", Leni, Melisa "Meme" yang selalu memberikan hiburan, semangat, dan menemani kala suka dan duka. Kebersamaan kita selama kuliah ini membuatku belajar tentang banyak hal. Untuk saling menyayangi, menghargai, dan memberi semangat satu sama lain. Kita selalu belajar bersama, kadang bertengkar, kadang menangis, namun kita selalu bersenang-senang bersama. Semua itu adalah kenangan terindahku selama kuliah di Program Studi Korea UI. I love you, all. Sukses terus untuk kalian!
7. Keluarga kedua saya Ruang Kaca, Widi "Bapak Panti" yang suka marah tetapi sebenarnya sangat peduli kepada saya. Oma, Akbar, Sola, Asti "nana" yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya dan tidak bosan-bosan menyemangati saya. Oki kakak laki-laki yang setia mengantar saya pulang, Ika, Lina, Hafiz, Danang, Dewi, Ayunk, Dodo, Chan terima kasih telah menampung tawa dan tangis serta pendorong semangat untuk terus maju. Saya selalu rindu "Bilik-bilik curhat" dan "Barbarita" yang membuat saya menangis dan tertawa. Lidya terima kasih atas semangatnya untuk saya dari *Negeri Singa*. Terima kasih yang sangat besar khususnya saya peruntukan kepada Axa, yang hampir selalu berada disamping saya dengan semangat, omelan, *bully-an*, pertengkaran, tawa dan tangis tetapi sekaligus telah membuat saya belajar tentang hidup dan mau berubah menjadi manusia yang lebih baik. 사랑해요.
8. Teman-teman yang turut membantu saya dalam mencari bahan-bahan skripsi saya Anggi, Chibi, Shinri, Ahda, Endah, Hyun jju, Lee Dam dan Jong In. Terima kasih sudah mau membaca dan tidak bosan membantu saya.
9. Seluruh teman di UI Hankook eo Dongari (Asosiasi Bahasa Korea UI), khususnya untuk teman-temanku Ming Young Oppa, Lim Song Kyung, Jiyeon Onni, Jongwon Oppa, Valdo, Anita, Tari, Grace, Nami, Young Ho Oppa, Hodong Oppa, Lusi, Ef yang selalu memberikan semangat

baik melalui sms, email, dan telepon serta teman-teman lain yg tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun dengan beberapa orang teman kini telah terpisah jarak, namun kenangan kita akan selalu di hati.

10. Teman-teman Hwarang angkatan 2007-2010 atas dukungan dan doanya. Khususnya TB, Odi, Nares, Mayang, Ellisa, Dian "Suketi", Putan "Pudel", Arie, Ari, Mini, Bata, Rani "Sam", Golda terima kasih untuk tawa disaat saya stress. Cepatlah menyusul!
11. Seluruh pihak yang senantiasa membantu, memberi semangat, menanyakan kabar skripsiku, dan mendoakan keberhasilanku.
12. Dan yang terakhir, untuk diriku yang mau terus berusaha, mau terus berjuang, dan terus mencoba tanpa mengenal lelah. Walau terkadang ada saat-saat dimana semua terasa berat dan melelahkan, namun diriku mau tetap terus berjuang sampai akhir perjuangan.

Harapan akhir saya, dengan segala ketidak sempurnaannya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak. Saya sangat berharap agar penelitian ini dapat terus berlanjut. Kritik dan saran akan selalu terbuka demi peningkatan kualitas yang lebih baik di masa depan.

Depok, Juli 2011

Silvi Fitri Ayu

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Fitri Ayu
NPM : 0606103685
Program Studi : Korea
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kebijakan-kebijakan Ekonomi Park Chung Hee dalam Industrialisasi di Korea Selatan Periode 1964-1979.

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Silvi Fitri Ayu)

ABSTRAK

Nama : Silvi Fitri Ayu
Program Studi : Bahasa dan Kebudayaan Korea
Judul : Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Park Chung Hee dalam Industrialisasi di Korea Selatan

Kesuksesan perekonomian dan industri di Korea Selatan, tidak terlepas dari peranan salah satu presiden Korea Selatan bernama Park Chung Hee (박정희) yang berasal dari kalangan militer. Meskipun kebijakan yang dijalankan menuai banyak kritik, Park Chung Hee memiliki jasa besar bagi Korea Selatan. Dalam waktu yang relatif singkat, melalui kebijakan-kebijakan ia berhasil memperbaiki perekonomian yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat Korea Selatan. Kebijakan Park Chung Hee pun menjadi dasar kesuksesan ekonomi dan industri Korea Selatan saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sejarah yang diawali dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah (heuristik) berupa buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Park Chung Hee. Setelah semua sumber dikritik, diverifikasi, dan diintegrasikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Park Chung Hee telah memberikan bentuk dasar perekonomian Korea Selatan sehingga membawa Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan.

Kata kunci: Park Chung Hee, perekonomian Korea Selatan, kebijakan ekonomi

ABSTRACT

Name : Silvi Fitri Ayu
Study Program : Korean Studies
Title : Economic Policies in the Park Chung Hee at South Korea's Industrialization

The success of economy and industry aspect in South Korea are linked to the role of one of the South Korean president, Park Chung Hee, which used the method that derived from the military. Despite his policy cause many critics, Park Chung Hee has a great service for South Korea. In a relatively short time, through his policies he was able to fix the economy that can advance the welfare of the South Korea peoples. Park Chung Hee's policy became the basis of the economic success and industry of South Korea today. The method that been used is the qualitative method with history approach which begins with collecting historical source or heuristic in form books and articles about Park Chung Hee. After all sources being criticized, verified, and interpreted, it can be concluded that the policies carried out by Park Chung Hee has provided the basic form of the South Korean economy that correlate in bringing South Korea into one of the country with economic power to be reckoned with.

Keywords: Park Chung Hee, South Korea's economy, economic policies

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup Masalah	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Tinjauan Histiografis	8
1.7 Sumber Sejarah	10
1.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II SEJARAH INDUSTRIALISASI DI KOREA	12
2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Korea	12
2.1.1 Faktor Internal	15
2.1.1.1 Faktor Eksogen	15

2.1.1.2 Peran Pemerintah	18
2.1.2 Faktor Eksternal	19
2.1.2.1 Periode Pendudukan Jepang (1910-1945)	21
2.1.2.2 Masa Pemerintahan Sementara Amerika Serikat di Korea Selatan	24
2.2 Perkembangan industri Korea Sebelum Park Chung Hee	26
BAB III PARK CHUNG HEE DAN KEBIJAKANNYA DALAM MEMERINTAH KOREA SELATAN	34
3.1 Pengenalan Mengenai Park Chung Hee	34
3.1.1 Kepemimpinan Park Chung Hee	35
3.1.2 Biografi Park Chung Hee (1917-1979)	37
3.2 Program dan Kebijakan Perekonomian Masa Pemerintahan Park Chung Hee	42
3.2.1 Badan Perencanaan Perekonomian (<i>Economic Planning Board / EPB</i>)	50
3.2.2 Kebijakan Berorientasi Ekspor (<i>Export-Oriented Industrialization / EOI</i>)	53
3.2.3 Kebijakan Industri Berat dan Kimia (<i>Heavy Chemical Industry/ HCI</i>)	57
BAB IV KESIMPULAN	62
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan atau yang bisa dikenal dengan nama *Daehan Minguk* (대한민국) merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Asia Timur yang terletak bersebelahan dengan Cina dan Jepang dan berbatasan secara langsung dengan Korea Utara. Korea Selatan memiliki ibukota bernama Seoul, luas negara ini meliputi bagian selatan Semenanjung Korea seluas 99.274 km². Korea Selatan memerdekakan diri pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Perang Dunia II.

Letak geografis Korea Selatan yang berada di Semenanjung Korea cukup strategis sehingga memungkinkan budaya Cina dibawa ke wilayah Jepang melalui daerah ini. Hal ini menyebabkan Korea juga memberikan kontribusi bagi penyebaran kebudayaan dari Cina ke Jepang, seperti ajaran Buddha dan Konfusianisme (Baker, 2008: 2).

Negara Korea Selatan memiliki batasan luar berupa lautan di ketiga arah mata angin. Hal ini memberikan pengaruh besar pada kehidupan masyarakat Korea Selatan terutama dalam kemampuan membuat kapal.

Keadaan strategis teritorial Korea membawa wilayah ini dalam konflik perebutan wilayah dengan negara-negara tetangga yang berpengaruh pada perkembangan perekonomian Korea. Berulang kali Cina, Rusia dan Jepang berusaha menginvasi Semenanjung Korea sebelum abad ke-20 walau akhirnya dapat dipatahkan oleh pertahanan militer Korea. Dengan dilatarbelakangi oleh kematian Ratu Myoengsong pada tahun 1895, Jepang memaksa Korea untuk

menandatangani perjanjian *Eulsa*¹ tahun 1905 yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang, sehingga Korea resmi menjadi negara boneka atau negara jajahan Jepang pada tahun 1910. Kependudukan Jepang membuat perekonomian, pemerintahan, pertahanan dan tatanan kehidupan rakyat Korea hancur berantakan karena eksploitasi total pihak Jepang terhadap Korea dalam kurun waktu 1910-1945 hingga akhirnya negara Korea memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1945.

Pada awal kemerdekaan Korea tahun 1945 perekonomian negara ini sangat terpuruk karena tidak adanya sistem dan struktur tersendiri.² Walaupun pada masa kependudukan Jepang perkembangan perekonomian Korea yang beralih dari agraris menjadi industri berat menjadi cukup maju, pada kenyataannya kemajuan dalam bidang industri ini tidak memberikan dampak yang lebih baik dalam perkembangan kesejahteraan rakyat Korea. Hasil dari industri ini hanya ditujukan untuk perkembangan ekonomi Jepang, sementara pihak Korea hanya menjadi buruh dan pemasok bahan mentah industri.

Selain itu, keadaan di Korea menjadi lebih buruk setelah Perang Dunia II dengan adanya perpecahan antara wilayah Korea bagian selatan dan Korea bagian utara yang didasari perbedaan ideologi yang dianut kedua wilayah yaitu paham kapitalis yang dianut Korea Selatan dan paham komunis yang dianut oleh Korea

¹ Perjanjian Eulsa merupakan perjanjian yang dilaksanakan antara Jepang dan Korea pada tahun 1905. Dalam Perjanjian ini Korea Selatan dipaksa untuk menerima bahwa tanah Korea digunakan sebagai pangkalan militer Jepang serta membatalkan hak diplomasi Korea (Kang, 2001:166).

² Pada masa itu (1945-1953) Korea Selatan tidak memiliki sistem dan struktur tersendiri dalam perekonomiannya dikarenakan menjelang kemerdekaannya perekonomian Korea dikendalikan oleh Jepang. Pasca penjajahan Jepang, Korea menjadi negara sendiri yang belum memiliki ideologi dan arah perekonomian yang jelas karena mengalami masa transisi dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Yang dimaksud dengan sistem dalam ekonomi adalah suatu dasar pemikiran (ideologi) yang menjadi pegangan untuk perkembangan perekonomian disuatu negara, sedangkan struktur ekonomi merupakan pola ekonomi yang menjadi tujuan negara tersebut dalam membangun perekonomiannya (misalnya pengembangan perekonomian dengan berfokus pada pola pengembangan industri berat) (Grossman. 2004: 63).

Utara. Perpecahan ini yang membuat perekonomian Korea Selatan menjadi goyah karena kekurangan infrastruktur di bidang industri. Hampir semua industri berat dan sumber daya alam terdapat di Korea utara (Young, 2003: 5).

Pasca Perang Dunia II (1950-1953), posisi Korea Selatan merupakan persaingan antara dua ideologi, yaitu liberal yang didukung Blok Barat dan komunis yang didukung Blok Timur. Keadaan ini membawa keuntungan tersendiri bagi Korea Selatan. Pada masa itu, Amerika Serikat memberikan bantuan besar dalam bidang ekonomi dan militer kepada Korea Selatan untuk menangkal masuknya kekuatan komunis. Kedatangan Amerika Serikat ke Korea Selatan cukup membantu perekonomian dan perindustrian Korea Selatan dari kebangkrutan total dengan menjadi penyokong dana untuk pembangunan Korea Selatan. Sehingga, Korea Selatan merasa berhutang budi pada Amerika Serikat (Song, Byung-Nak. 1997: 41).

Dalam perjalanan sejarahnya, Korea Selatan masuk dalam salah satu negara termiskin di dunia yang posisinya sejajar dengan negara-negara miskin di Afrika dan Asia pada tahun 1950-an. Namun, ketika tahun 1990-an, Korea Selatan mampu menjadi salah satu negara modern yang memiliki industri terbesar dan tingkat perekonomian terbaik di Asia, sehingga kedudukannya pun diperhitungkan oleh dunia. Korea Selatan bersama-sama dengan Cina dan Jepang dianggap sebagai Macan Asia karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi (International Monetary Fund. *Economic Growth Rates of Advanced Economies*. 2010-09-08).

Kesuksesan perekonomian dan industri Korea Selatan tidak terlepas dari peranan seorang pemimpin yang bernama Park Chung Hee (박정희). Park Chung

Hee adalah presiden Korea Selatan yang berkuasa pada tahun 1961-1979. Dia berasal dari kalangan militer yang memiliki jabatan yang cukup tinggi, yaitu Jenderal Angkatan Darat selama Perang Korea (1950-1953). Sebelum menjabat menjadi presiden, Park Chung Hee sempat ikut andil dalam pemberontakan kelompok komunis (1948) yang nantinya akan memisahkan diri menjadi kelompok Korea Utara (1953) (Chong, Yong-jin.1997. Vol1 : 260).

Setelah Perang Korea, Park Chung Hee memimpin pemberontakan militer pada 16 Mei 1961. Pemerintah yang berkuasa pada masa itu memihak kepada kaum pemberontak sehingga Park Chung Hee semakin melejit pangkatnya.

Park Chung Hee mendapatkan kursi presiden dengan mengambil alih pemerintahan melalui kudeta yang dilakukannya. Park Chung Hee yang berpegang teguh pada disiplin militer menjadikannya kepala negara dengan bentuk pemerintahan keras dan diktator. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya pemerintahan Park Chung Hee. Dengan jatuhnya Park Chung Hee berdampak melemahnya kembali perkembangan ekonomi Korea. Banyak insiden yang terjadi selama Park Chung Hee berkuasa yang dipengaruhi oleh ketidaksukaan rakyat, pelajar maupun militer dan juga pejabat negara terhadap caranya memerintah. Salah satunya berujung kepada kematian istrinya dalam rencana pembunuhan Park Chung Hee yang kedua. Park Chung Hee kemudian tewas pada rencana pembunuhan berikutnya yang dilakukan oleh Direktur KCIA³, Kim Jae Kyu pada tahun 1979 di depan publik.

Meskipun banyak kebijakan yang dibuat Park Chung Hee tidak populer, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beliau memiliki jasa yang sangat besar pada

³ Korean Central Intelligence Agency yang merupakan lembaga intelijen Korea Selatan.

negara Korea Selatan. Park Chung Hee mampu memperbaiki perekonomian Korea Selatan yang otomatis membantu memajukan kesejahteraan rakyatnya dalam waktu relatif singkat. Sebagai Presiden Korea Selatan, Park Chung Hee menitikberatkan pembangunan negaranya dengan kebijakan-kebijakan baru yang memfokuskan pada perkembangan industri secara modern, serta kebijakan perekonomian Korea Selatan yang mengadopsi dari kebijakan industri dan perekonomian Jepang. Kebijakan Presiden Park Chung Hee menjadi dasar dari kesuksesan ekonomi dan industri Korea Selatan hingga sekarang.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah kebijakan-kebijakan ekonomi Park Chung Hee dan dampaknya dalam perkembangan industrialisasi Korea Selatan. Untuk membahas masalah di atas, diajukan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian Park Chung Hee dalam industrialisasi di Korea Selatan?
2. Apa saja kebijakan-kebijakan ekonomi Park Chung Hee?
3. Bagaimana dampak kebijakan-kebijakan ekonomi Park Chung Hee terhadap perkembangan industrialisasi di Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi Park Chung Hee dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi

yang mempengaruhi perkembangan industrialisasi di Korea Selatan. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan ekonomi Park Chung Hee sehingga pembaca dapat memahami lebih dalam lagi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan Park Chung Hee yang menjadi dasar perkembangan perekonomian dan industri di Korea Selatan. Selain itu, penelitian ini menjelaskan dampak-dampak berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan Park Chung Hee berkaitan dengan pengembangan industrialisasi di Korea Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan sejarah, terdapat batasan untuk mengkaji suatu permasalahan, yaitu batasan dari segi temporal (waktu), batasan spasial (tempat) dan tematis.

Dari segi temporal, skripsi ini membahas periode ekonomi tahun 1961-1979. Skripsi ini memfokuskan pada kebijakan-kebijakan ekonomi presiden Park Chung Hee dalam mengembangkan industrialisasi di Korea Selatan. Pada kurun waktu ini perekonomian Korea Selatan mengalami perkembangan yang luar biasa terutama di bidang industri sehingga menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara industri di dunia.

Dari segi spasial, fokus skripsi ini ditujukan pada sejarah proses perkembangan industrialisasi Korea Selatan yang telah dicapai selama masa kekuasaan presiden Park Chung Hee. Industrialisasi telah mengubah status Korea Selatan sebagai negara miskin pasca Perang Dunia II (1939-1945) dan perang saudara (Perang Korea) pada tahun 1950-1953 menjadi salah satu negara industri di dunia, terutama di wilayah Asia. Kemudian, dari segi tematis, penelitian ini

membahas sejarah, kebijakan-kebijakan ekonomi, proses, dampak kebijakan-kebijakan tersebut dalam perkembangan industrialisasi di Korea Selatan pada masa kekuasaan Park Chung Hee.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah diawali dengan mengumpulkan sumber sejarah (heuristik). Sumber-sumber yang terkait dengan perekonomian dan industrialisasi Korea Selatan, terutama pada masa kekuasaan Park Chung Hee. penulis menggunakan sumber sejarah tertulis berupa kajian pustaka.

Sumber-sumber penelitian ini penulis peroleh dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB UI), Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perpustakaan *Korean Cultural Center* Jakarta dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dari perpustakaan-perpustakaan tersebut, penulis memperoleh sumber-sumber berupa buku dan artikel terkait dengan topik penelitian.

Langkah-langkah penelitian dengan pendekatan sejarah dimulai dengan tahap pertama berupa heuristik. Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Pada tahap kedua dilakukan kritik. Kritik ini terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah kritik yang didasarkan kepada keaslian fisik sumber sejarah. Kritik internal adalah kritik yang didasarkan kepada isi sumber sejarah yang digunakan. Namun, dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber kepustakaan yang diproduksi secara

massal sehingga kritik yang dilakukan secara mendalam adalah secara kritik internal.

Tahapan ketiga adalah melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah yang sudah dipilih melalui tahapan kritik. Pada tahapan ini peneliti melakukan perbandingan terhadap sumber-sumber sejarah yang digunakan.

Tahap keempat dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam sumber-sumber sejarah yang didapat penulis. Interpretasi ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah melewati proses verifikasi.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang ditemukan diseleksi, disusun, diberi penekanan, dan ditempatkan dalam suatu urutan yang kronologis dan sistematis. Penulis menyeleksi dan memberi tekanan pada fakta-fakta yang bisa menggambarkan proses kebijakan-kebijakan Park Chung Hee dalam mengembangkan industrialisasi di Korea Selatan.

1.6 Tinjauan Historiografis

Penelitian mengenai sejarah ekonomi Korea Selatan, terutama mengenai perkembangan industrialisasi Korea Selatan pada masa kekuasaan Park Chung Hee cukup banyak dilakukan. Ada beberapa buku dan artikel yang penulis temukan mengulas tentang masalah tersebut. Pertama adalah buku yang ditulis oleh Chang Yun-Shik dan Steven Hugh Lee, *Transformation in Twentieth Century Korea* (2006). Buku ini menguraikan tentang perubahan-perubahan berbagai bidang yang terjadi di Korea seperti transformasi pertanian, transformasi

bisnis dan industri, transformasi budaya dan ideologi serta transformasi dalam pemerintahan. Meskipun buku ini menjelaskan transformasi bisnis dan industri, penjelasan yang diberikan buku ini kurang mendetail terutama tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa awal industrialisasi di Korea Selatan.

Buku lain yang ditulis oleh Kim Hyung-A, *Koreas's Development Under Park Chung Hee* (2004) membahas situasi Korea di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung Hee yang merupakan titik awal industrialisasi Korea Selatan. Buku ini juga menceritakan tentang kebijakan-kebijakan serta sistem pemerintahan yang dianut oleh Park Chung Hee. Buku ini menjelaskan industrialisasi yang terjadi di masa Presiden Park Chung Hee.

Buku ketiga adalah buku yang ditulis oleh Alice H. Amsden berjudul *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization* (1989). Buku ini membahas Korea Selatan sebagai suatu contoh negara yang mengalami "late industrialization"⁴ dengan menyertakan faktor-faktor dan alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya fenomena ini.

Buku keempat adalah *Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur* yang ditulis Helen Hughes (1992) membahas tentang keberhasilan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara industri baru di Asia Timur. Buku ini memberikan gambaran tentang perkembangan industri di beberapa negara maju di Asia Timur.

Buku kelima ditulis oleh Lee Byeong-Cheon berjudul *Developmental Dictatorship and The Park Chung Hee Era* (2003). Buku ini membahas tentang

⁴ Late Industrialization merupakan teori yang menjelaskan bahwa sebuah negara yang terlambat dibandingkan negara-negara lain dalam melaksanakan industri memiliki keuntungan untuk mengadaptasi teknologi industri dari negara lain. Negara yang mengadopsi teknologi ini memiliki keuntungan untuk memilih teknologi yang paling baik dan cocok untuk dikembangkan di negara tersebut. Sehingga walaupun bukan sebagai pencetus ide teknologi tersebut, dengan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan negara tersebut, negara tersebut dapat mengembangkan industri itu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dilakukan negara Korea Selatan dengan mengadopsi teknologi dari Jepang, industri Korea dapat berkembang pesat.

sistem ekonomi, struktur ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada zaman kepemimpinan Park Chung Hee.

Kemudian ada tulisan berupa artikel yang ditulis oleh Donald Gregg, *Park Chung Hee* (23 Agustus 1999) di majalah Time. Artikel ini membahas sosok dan pemikiran Park Chung Hee yang berkaitan dengan sistem kepemimpinan yang dia laksanakan selama berkuasa sebagai presiden Korea Selatan, termasuk kebijakan-kebijakan ekonominya.

1.7 Sumber Sejarah

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel. Sumber-sumber itu penulis peroleh antara lain dari berbagai perpustakaan dan lembaga penelitian, seperti Perpustakaan Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perpustakaan *Korean Cultural Center* Jakarta dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

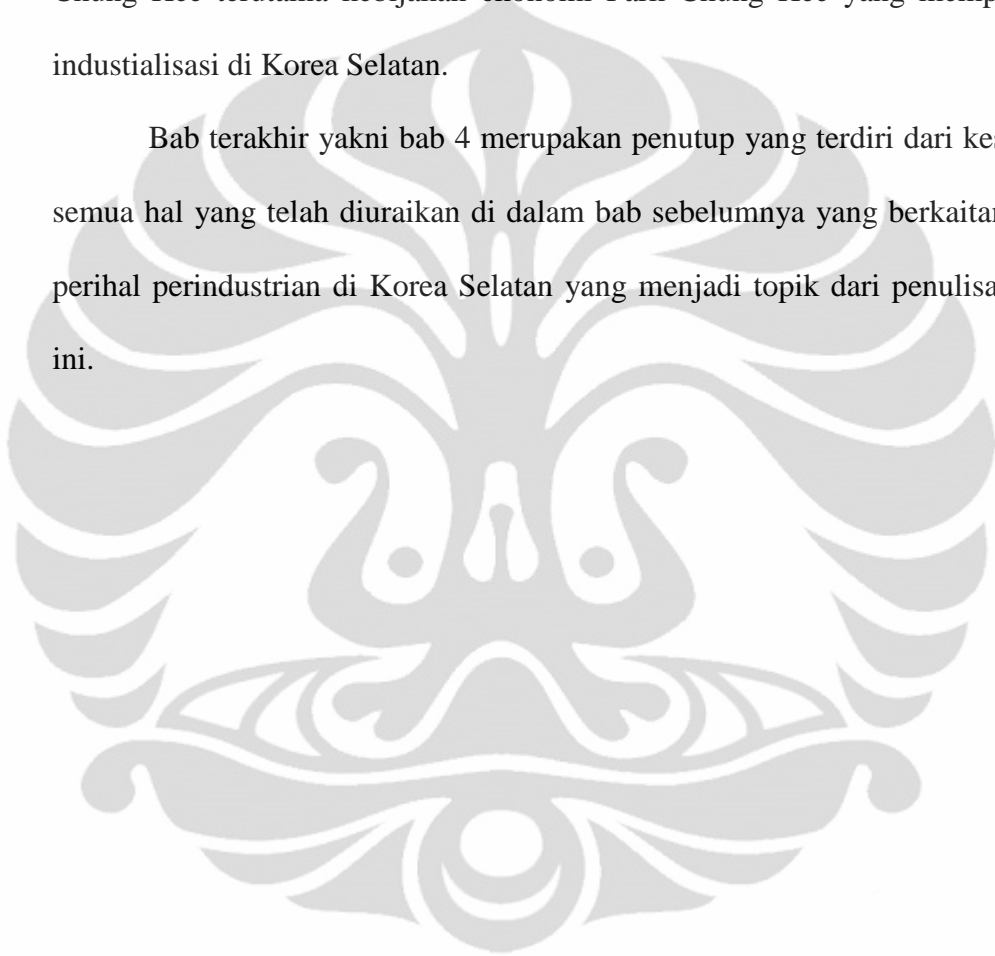
1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, pada masing-masing bab juga terdapat subbab yang lebih memperincikan pembahasan. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup masalah, metode penelitian, tinjauan historiografis, sumber sejarah dan sistematika penulisan.

Bab 2 menjelaskan sejarah industrialisasi di Korea dengan latar belakang internal dan eksternal industri Korea Selatan untuk mengetahui bagaimana perkembangan industri di Korea sebelum masa kepemimpinan Park Chung Hee.

Bab 3 menjelaskan kondisi Korea Selatan di bawah kepemimpinan Park Chung Hee terutama kebijakan ekonomi Park Chung Hee yang mempengaruhi industrialisasi di Korea Selatan.

Bab terakhir yakni bab 4 merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan semua hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya yang berkaitan dengan perihal perindustrian di Korea Selatan yang menjadi topik dari penulisan skripsi ini.



BAB II

SEJARAH INDUSTRIALISASI DI KOREA

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Korea

Pada awal dekade 1980, perhatian internasional dipusatkan pada fenomena *economic miracle* (keajaiban ekonomi) yang dialami beberapa NICs⁵ di kawasan Asia Timur (di luar Jepang). Bersumber dari laporan Bank Dunia pada tahun 1993, Terdapat empat negara yang yang dinilai bisa mematahkan pemikiran bahwa pertumbuhan hanya sebuah mitos dalam perkembangan ekonomi, yaitu Hongkong, Republik Korea (Korea Selatan), Taiwan dan Singapura. Dalam waktu tiga dekade, keempat negara yang disebut '*Four Tigers* (Empat Macan)' ini telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan (*annual growth*) sebesar 5,5% lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya di dunia. Keberhasilan yang ditunjukkan oleh Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dilakukan melalui proses industrialisasi besar-besaran dengan didukung oleh kebijakan ekonomi yang solid dengan menekankan pada efisiensi, produktivitas dan ekspansi pasar (Hundt: 3).

Menurut David Hundt ada 3 pendekatan teori yang sering digunakan untuk menjelaskan hubungan juga hambatan dalam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.

1. Pendekatan Neoklasik

Pendekatan neoklasik terfokus pada sistem pasar bebas. Pendekatan ini menekankan pada peran pemerintah dan pendekatan yang menekankan

⁵ NICs merupakan kepanjangan *Newly Industrialized Countries* atau negara-negara industri baru. (Hughes, 1992).

ketergantungan pada pengalokasian sumber daya yang efisien berhubungan dengan kekuatan pasar dan strategi pasar yang berorientasi ekspor. Berdasarkan *law of comparative advantage* yang menyatakan bahwa dua negara akan memperoleh keuntungan jika ada perbedaan biaya produksi, para ahli ekonomi Neoklasik menyimpulkan bahwa Korea Selatan mencapai dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi karena mengadopsi kebijakan berorientasi ekspor sejak pertengahan tahun 1960-an. Namun, menurut mereka pasar akan mempunyai kekuatan distribusi yang lebih besar apabila pemerintah melakukan intervensi lebih jauh lagi untuk memperoleh pasar ekspor (Amsden 1989; Wade 1990).

2. *Developmental States*

Pendekatan *Development States* dipengaruhi oleh ahli ekonomi radikal dari Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa keberhasilan perkembangan ekonomi di Korea Selatan adalah berkat ketergantungan yang cukup tinggi pada modal asing, teknologi dan perdagangan (Evans 1979; Kim 1988; Castley 1997, 1998). Namun, hal ini memiliki kemungkinan besar memberi dampak buruk seperti *stagnasi* dan *underdevelopment*⁶ (Cardoso, 1977). Tidak hanya dampak buruk saja yang didapat, tetapi juga dampak baik. Salah satu dampak baik tersebut adalah perubahan hubungan antarnegara seperti dengan Jepang, menjadi hubungan yang lebih menguntungkan bagi kedua negara.

⁶ *Stagnasi* ekonomi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi berjalan lambat (biasanya diukur berdasarkan pertumbuhan GDP) pada suatu periode tertentu. *Underdevelopment* merupakan situasi ketika negara tidak memiliki kemampuan untuk membangun, misalnya dikarenakan oleh kemiskinan.

3. Pendekatan Ketergantungan (*Dependency Approach*)

Berbeda dari kedua pendekatan di atas yang memfokuskan pada faktor internal, dalam negara Korea Selatan, pendekatan Ketergantungan ini terfokus pada faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara industri baru diantaranya adalah perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur. Terutama adanya hegemoni kekuasaan Amerika Serikat setelah runtuhnya Blok Timur pada tahun 1989.

Walaupun banyak pengamat yang mengaitkan keberhasilan ekonomi yang dicapai NICs dengan faktor-faktor eksternal, yaitu dengan perang dingin Timur-Barat dan hegemoni AS⁷.

Faktor-faktor internal yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara cepat tidak boleh diabaikan seperti; kondisi sumber daya alam dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan perekonomian (Hadiwinata, 2002: 79). Kedua faktor saling terkait dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Keterkaitan antara faktor eksternal dan internal merupakan pemicu besar suatu negara dalam membangun perekonomian yang mendorong terbentuknya sistem dan struktur ekonomi negara demi keberhasilan perekonomian. Faktor-faktor ini juga dimiliki oleh Korea Selatan sebagai salah satu negara NICs, Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor inilah yang menjadi alasan yang mendorong Korea Selatan mengembangkan perekonomian yang menitikberatkan pada bidang industri.

⁷ Dua blok yang berkuasa pasca perang dunia, terutama pemimpin blok-blok ini yaitu AS dan Rusia saling berkompetisi untuk mempertahankan pengaruh mereka di wilayah-wilayah yang menjadi sekutunya. Mereka biasanya memberikan bantuan keamanan dan ekonomin agar wilayah yang menjadi sekutunya aman dari pengaruh ideologi blok lawan. Seperti AS yang memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Selatan demi menjaga Korea Selatan dari pengaruh blok timur yang menganut ideologi komunis. (Mason. 1980)

Pemilihan strategi pertumbuhan yang benar penting untuk mengawali dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang ada pada negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Korea Selatan sejak awal tahun 1960-an sebagian besar karena pemilihan strategi industri yang dianggap tepat dengan melihat pada faktor-faktor eksternal dan internal yang ada di Korea Selatan pada masa itu.

2.1.1 Faktor Internal

Keberhasilan pembangunan ekonomi Korea Selatan mengundang berbagai interpretasi faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan tersebut. Salah satu faktor itu adalah faktor internal yang berkaitan dengan kondisi atau situasi dalam negeri negara tersebut yang berpengaruh kuat pada kuat terhadap keberhasilan pembangunan ekonominya. Helen Hughes mengutip pendapat Riedel (1974), bahwa ada dua faktor internal bagi keberhasilan pembangunan dan industrialisasi di Korea Selatan, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi eksogen⁸ dan faktor-faktor yang berkaitan dengan peran pemerintah serta kebijakan ekonomi yang dijalankan.

2.1.1.1 Faktor Eksogen

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam, khususnya tanah dapat dianggap sebagai faktor pemicu bagi proses industrialisasi di Korea Selatan karena dua alasan, yaitu sektor pertambangan dan pertanian yang relatif kecil telah mengurangi potensi

⁸ Faktor eksogen merupakan faktor yang berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di luar individu dan menyangkut segala sesuatu yang ada disekitar individu baik fisik, biologis maupun sosial.

pertentangan politik terhadap proses industrialisasi dan pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian yang cenderung lebih lambat daripada sektor lain. Sehingga semakin kecil sektor pertaniannya akan semakin mudah bagi negara tersebut untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi dengan mengacukan pada perindustrian yang dipercaya mampu membawa perkembangan perekonomian secara pesat. Selain itu, Kondisi alam Korea Selatan yang tidak menguntungkan membuat Korea Selatan tidak mempunyai kesempatan untuk memilih strategi yang berorientasi pada sektor primer. Oleh karena itu, Korea Selatan harus tumbuh dengan mengembangkan industri pengolahan.

Strategi pembangunan yang berorientasi pada industri mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan yang berorientasi pada sektor primer atau sumber daya alam. Perekonomian negara yang berorientasi pada pengembangan sektor primer sangat rentan terhadap fluktuasi harga-harga komoditas primer. Ada pula kemungkinan sumber daya primer akan habis atau kalah bersaing dengan produsen yang lebih efisien dan memiliki kualitas bahan tinggi maupun terhadap barang-barang sintesis yang praktis sedangkan negara yang berorientasi pada industri lebih mudah maju karena sesuai dengan kebutuhan negara-negara sedang berkembang untuk secara terus menerus mentransformasikan struktur produksinya dari produk-produk yang sederhana kepada produk-produk yang lebih padat modal, padat teknologi dan padat tenaga terampil.

Kondisi ini akhirnya mendorong Korea Selatan untuk mengembangkan ekonomi ke arah industri terutama pada industri pengolahan yang berorientasi pada ekspor karena daya beli masyarakat yang kecil di dalam negeri.

2. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Korea Selatan termasuk banyak sehingga tingkat kepadatan penduduk per wilayah relatif tinggi, seperti halnya kebanyakan negara sedang berkembang lainnya. Yang membedakannya dari negara-negara lainnya adalah kualitas tenaga kerja mereka, yang tekun, loyal, dan bekerja keras serta mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap pendidikan. Menurut Hughes yang mengutip dari Han, S. S (1984), hal ini merupakan pengaruh dari warisan Konfusianisme sejak 14 abad yang lalu, kembali Helen Hughes yang juga mengutip Balassa (1988) disatu sisi, banyak ahli berpendapat bahwa perilaku ekonomi masyarakat di seluruh belahan dunia ternyata lebih di dorong oleh faktor insentif ekonomi⁹.

Helen Hughes mengambil pendapat Baum (1982) sebagai contoh jelas adalah Republik Rakyat Cina sebelum adanya reformasi ekonomi pada akhir tahun 1980-an. RRC juga mewarisi tradisi dan budaya Konfusianisme, namun pertumbuhan ekonominya tetap rendah di bawah sistem ekonomi sosialis atau komunis karena tiadanya rangsangan ekonomi yang cukup. Contoh yang lebih relevan adalah Korea Utara. Meskipun negara ini mewarisi tradisi dan budaya Konfusianisme seperti halnya Korea Selatan, namun kinerja ekonominya berada di bawah sistem ekonomi komando [ekonomi secara tertutup] yang

⁹ Intensif ekonomi merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar (Luthans. 1998: 144).

tidak terbuka dan fleksibel seperti sistem ekonomi Korea Selatan. Insentif ekonomi tampaknya juga merupakan faktor yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dibandingkan dengan faktor budaya semata (Hughes, 1992: 36).

2.1.1.2 Peran Pemerintah

1. Peran Pemerintah

Menurut Adam Smith ada tiga kewajiban penting pemerintahan, yaitu pertahanan dan keamanan, menyelenggarakan peradilan dan menciptakan pekerjaan umum. Bisa dikatakan pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan barang publik¹⁰ (Hughes, 1992: 39). Korea Selatan termasuk salah satu negara Asia Timur yang telah membangun infrastruktur yang memadai sehingga mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi karena dengan tersedianya infrastruktur yang memadai telah memungkinkan sektor industri beroperasi secara efisien dan menguntungkan.

2. Pemberian Insetif bagi Sektor Industri

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan adalah lebih dari peran minimum. Dalam bidang industri, pemerintah secara aktif memberikan fasilitas bebas bea masuk atas impor barang modal dan barang antara serta fasilitas kredit bersubsidi bagi para eksportir.

¹⁰ Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti: konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya; dan noneksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Sebagai contoh: jalan raya adalah barang publik, banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut; semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya (noneksklusif); dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan.

Tingkat proteksi pada dasawarsa 1970 meningkat dengan pesat untuk mendorong pengembangan industri berat dan industri kimia. Selain itu kedua sektor tersebut juga diberi fasilitas kredit murah dengan tingkat bunga yang disubsidi serta diberikan potongan pajak.

Keterlibatan pemerintah Korea Selatan dalam perekonomian negara sebenarnya merupakan pelanggaran dari ajaran Neoklasik dengan adanya kepemilikan pemerintah atas sarana produksi yang mencakup sektor perbankan dan berbagai jenis industri barang antara yang padat modal seperti industri baja, petrokimia, pupuk, dan industri kimia dasar. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan aspek makro ekonomi, baik kebijakan fiskal, moneter maupun nilai kurs valuta asing. Namun dipercaya bahwa seluruh kebijakan makro ekonomi memiliki peranan yang sama pentingnya dengan kebijakan insentif dalam bentuk perluasan ekspor dan pertumbuhan sektor industri yang pesat.

Pemerintah Korea Selatan telah memenuhi fungsi minimumnya, termasuk penyediaan berbagai infrastruktur yang penting serta terlibat dalam tiga kegiatan utama, yaitu berperan aktif dalam mengatur sistem insentif bagi sektor industri, mempertahankan stabilitas ekonomi makro dan mendirikan beberapa perusahaan pemerintah yang menguasai hajat hidup orang banyak (Hughes, 1992: 52).

2.1.2 Faktor Eksternal

Korea memilih ekspor sebagai strategi pertumbuhan ekonomi mereka. Khususnya, Korea memfokuskan pada penjualan produk manufaktur ke luar negeri, dan strategi perekonomian seperti ini mendorong negara Korea, dari salah

satu negara paling miskin di dunia yang jatuh dan bangkrut karena perang, menjadi salah satu anggota negara G20 hanya dalam kurun waktu setengah abad. Korea telah berhasil mengubah dirinya dari penerima bantuan internasional menjadi negara donor. Pada masa lalu, tulang punggung perekonomian Korea berbasis pada pengolahan bahan dan komponen yang diimpor dari luar negeri dan mengekspor produk yang telah diolah di negaranya ke luar negeri.

Keberhasilan Korea tidak lepas dari pengaruh asing yang menyebabkan Korea sempat mengalami masa ketergantungan ekonomi kepada negara lain, terutama Amerika Serikat. Korea Selatan juga menderita segala kekurangan terutama pada sumber daya alam setelah masa kepududukan Jepang. Selepas perang saudara, modal awal yang dimiliki Korea Selatan adalah sebuah lembaga penelitian dan pengembangan pertahanan nasional serta badan penelitian energi atom yang didirikan tahun 1959. Pada tahun 1960 Korea Selatan mulai belajar dari negara lain terutama Amerika Serikat dalam mengembangkan riset di bidang industri ringan (Winanti, 2003)

Pengaruh Jepang dan Amerika Serikat dalam perjalanan sejarah Korea Selatan berdampak pada perkembangan ekonomi Korea Selatan. Walaupun sesungguhnya pengaruh kekuatan kedua negara ini di Korea adalah demi keuntungan pribadi negara-negara pemberi bantuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kedua negara yang merupakan faktor-faktor eksternal¹¹ perekonomian Korea ini telah membantu Korea mengembangkan diri sebagai bangsa yang maju baik dalam segi militer, ideologi, dan terutama di bidang ekonomi.

¹¹ Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dan memberi pengaruh pada perkembangan suatu bangsa.

2.1.2.1 Periode Pendudukan Jepang (1910-1945)

Industrialisasi sudah mulai dikenal rakyat Korea Selatan sejak zaman kolonialisme Jepang yang berlangsung dari tahun 1910 sampai 1945. Hal ini disebabkan menjelang datangnya kolonialisme Jepang di Korea, negeri itu tidak terdapat kelompok pedagang (hal ini disebabkan karena ajaran Konfusinisme yang mereka anut menyatakan bahwa “mengumpulkan kekayaan, bukanlah suatu hal yang terpuji”). Semenanjung Korea yang memiliki garis pantai sekitar 8.460 kilometer yang terdiri dari ribuan pulau kecil, terutama yang berada di barat dan selatan merupakan usus buntu Asia Timur yang diperebutkan sejak zaman dahulu oleh bangsa-bangsa besar di kawasan itu karena posisinya yang strategis. Kekaisaran Jepang merebut Semenanjung Korea dari Dinasti Qing yang memerintah China setelah mengalahkan dinasti itu dalam perang yang terjadi tahun 1894 hingga 1896. Satu dekade kemudian, setelah mengalahkan Kekaisaran Rusia dalam perang yang terjadi antara 1904-1905, Jepang menjadikan Korea sebagai salah satu wilayah di bawah proteksinya (McNamara, 1990: 37). Tetapi lima tahun kemudian, pada tahun 1910 Jepang menduduki Korea dan menjadikannya sebagai salah satu pangkalan untuk mendukung program militerisasi yang sedang dikembangkan ke Manchuria dan daratan China, untuk selanjutnya ke seluruh daratan Asia hingga kepulauan Asia Tenggara. Di saat bersamaan, Jepang juga mengembangkan sayap hingga ke Samudera Pasifik, menduduki satu persatu pulau penting yang dikuasai negara-negara Eropa di samudera itu, dan mempersiapkan serangan besar untuk menundukkan Amerika Serikat. Maka, dapat dikatakan Korea merupakan pangkalan militer Jepang yang

penting di wilayah Asia. Kekuasaan kolonialisasi Jepang yang berlangsung selama 35 tahun membawa perubahan bagi Korea Selatan, yaitu menjadikan Korea Selatan sebagai negara semi industri. Industri-industri ringan mulai berkembang setelah tahun 1910. Pembangunan industri berat berkembang pesat setelah tahun 1926 dengan didirikannya pabrik nitrogen dan hidroelektris oleh perusahaan Noguchi Jepang. Produksi biji besi, baja serta produk industri mesin meningkat setelah investasi modal perusahaan-perusahaan Jepang semakin besar di Korea. Selama penjajahan Jepang, pertumbuhan ekonomi Korea mengalami peningkatan yang cukup berarti selama tiga dekade (1910-1940) nilai total dari seluruh produksi komoditas meningkat dari 645 juta won menjadi 1,661 juta won (*Ibid.*, 38). Tetapi angka pertumbuhan produksi ini, lebih menunjukkan pada kepentingan negara penjajah yaitu, Jepang.

Pada masa awal penjajahan, Jepang melakukan eksploitasi ekonomi di Korea secara sah dengan bekerja sama dengan pegawai *Chosun* yang melakukan korupsi. Eksploitasi ekonomi dilakukan Jepang dengan cara mengekspor barang-barang industri Jepang yang murah ke Korea dan mengimpor bahan-bahan mentah yang mahal dari Korea namun dengan harga yang sangat murah. Akhir abad ke-19 sampai masa pecahnya Perang Dunia II, Jepang jauh lebih mementingkan penanaman modal di Korea daripada melakukan ekspor-impor barang industri. Penanaman modal ini dilakukan oleh kaum kapitalis yang memonopoli keuangan Jepang. Untuk menyelamatkan modalnya yang ditanam di Korea, Jepang memperkuat kebijakannya di Korea, baik secara politis maupun secara militer. Penjajahan

Jepang dengan menggunakan tangan yang lain, memasukkan nilai-nilai kapitalismenya modernisasi masyarakat Korea. Modal untuk melakukan modernisasi ini didapat dari hasil penanaman modal Jepang di Korea (Winarno, 2009: 159).

Pada saat perekonomian Korea telah dipegang kuat oleh Jepang, Jepang secara perlahan-lahan mulai menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Korea, menguasai wilayah Semenanjung Korea dan memasukkan masyarakat Korea ke dalam struktur masyarakat Jepang. Salah satu cara Jepang untuk masuk secara mudah ke dalam struktur masyarakat Korea tanpa menimbulkan kesan Jepang adalah penjajah adalah dengan memperbolehkan rakyat Korea memperoleh pendidikan.

Proyek pembangunan dasar (infrastruktur) mulai dikerjakan di Korea seperti layaknya jalur rel kereta api, pembangunan stasiun pembangkit tenaga listrik, fasilitas pelabuhan dan jalan raya. Pembangunan itu memang berguna untuk memulai proses modernisasi Korea namun pada masa ini sudah jelas bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dimanfaatkan untuk memperlancar kebijakan penjajahan Jepang, baik dari segi ekonomi, maupun militer. Dengan memegang dan mengawasi perkembangan infrastuktur penting di Korea, Jepang dapat dengan mudah menyelusup dan melaksanakan segala tujuannya dalam masa kependudukannya di Korea.

Pada tahun 1931, Jepang mengobarkan Perang Manchuria yang berhasil meningkatkan posisi semenanjung Korea secara strategis. Jepang menjadikan Korea sebagai basis logistik perang dan secara besar-besaran melakukan eksplotasi untuk membuat peralatan perang. Peralatan makan

rakyat Korea (mangkuk, sendok, garpu, dan sebagainya) yang terbuat dari logam disita dan dilebur kembali untuk dijadikan senjata perang Jepang (Mas'ood, 2007: 26). Situasi ini terus berlangsung hingga akhirnya Jepang kalah dan menyerah kepada sekutu pada tahun 1945.

Penjajahan Jepang membawa banyak sekali dampak buruk bagi Korea, tetapi tidak dapat dipungkiri, pada masa pendudukan Jepang, bangsa Korea mulai mengenal struktur ekonomi baru yang jelas yaitu ekonomi industri, kelas pekerja, maupun mulai melakukan penyerapan teknologi walau mungkin dalam bentuk yang lebih sederhana. Warisan masa pendudukan Jepang inilah yang dikemudian hari membuat Korea mampu mengembangkan ekonominya dalam bidang Industri.

2.1.2.2 Masa Pemerintahan Sementara Amerika Serikat di Korea Selatan

Setelah masa pendudukan Jepang, Korea pecah menjadi Korea Selatan yang menganut kapitalis dan Korea Utara yang menganut sistem komunis, pada masa inilah kegiatan ekonomi Korea Selatan sebagai negara mandiri pun dimulai. Hampir semua infrastruktur industri berat dan sumber daya alam terdapat di Korea Utara, hal ini menyebabkan melemahnya kondisi perekonomian Korea Selatan. Saat itu Korea Selatan mulai mengembangkan dirinya, namun karena adanya pertentangan ideologi diantara wilayah selatan dan utara mengakibatkan munculnya ketidakstabilan politik dan sosial di dalam kehidupan masyarakat Korea. Pada saat ini Amerika Serikat muncul sebagai penyokong dana untuk Korea selatan. Amerika serikat yang

mempunyai kepentingan besar untuk menangkal pengaruh komunis dari Korea Utara, memberikan dukungan penuh kepada Korea Selatan (Young, 2003: 34).

Setelah masa penjajahan dan perang saudara, Korea Selatan mengalami inflasi dan defisit keuangan yang besar¹². Dalam keterpurukan ekonomi serius karena inflasi dan defisit yang luar biasa, kehidupan rakyat umum tertentu sangat memprihatinkan. Di masa awal pemerintahan Korea yang baru, perekonomian nasional hampir dipenuhi oleh bantuan Amerika Serikat. Bahkan menurut data yang disusun Bank Ekpor-Impor Korea, pemerintah Korea mendapat bantuan sebanyak 3,02 milyar dollar AS selama 15 tahun antara 1945 sampai dengan 1960. Selain dari bantuan gratis, Amerika Serikat memberikan bantuan militer tersendiri yang berjumlah 1,3 milyar dollar AS sampai tahun 1959. Jumlah bantuan gratis dari Amerika ke Korea sampai tahun 1960 mencapai 4,32 milyar dollar AS. Kebanyakan bantuan gratis non-militer segera ditukarkan mata uang Korea dan digunakan mengimpor bahan-bahan makanan dan bahan-bahan lainnya yang bersifat konsumtif (Mas'eod, 2007: 135).

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, bantuan Amerika Serikat ini juga mulai digunakan untuk mengembangkan ekonomi terutama sektor industri substitusi impor. Sejumlah dana bantuan dari Amerika Serikat efektif untuk mencapai dan terciptanya stabilitas ekonomi. Dana Amerika Serikat sangat berguna dalam melindungi perekonomian Korea Selatan.

¹² Inflasi di Korea Selatan terjadi karena menjelang Perang Dunia II, penjajah berlomba-lomba menerbitkan uang Korea (Mas'eod, 2007: 134).

2.2 Perkembangan industri Korea sebelum Park Chung Hee

Secara umum perkembangan perekonomian Korea pada masa penjajahan Jepang dapat kita bedakan menjadi dua periode, yaitu tahun 1910 hingga tahun 1920an dan periode tahun 1930 sampai tahun 1945. Pada periode tahun 1910-1920, pembangunan ekonomi Korea oleh Jepang bertujuan untuk mendukung kebijakan swasembada pangan dengan pembangunan infrastruktur seperti saluran-saluran irigasi dan industri-industri pengolahan pertanian. Kegiatan ekonomi berfokus pada peningkatan surplus pertanian Korea untuk menyuplai kebutuhan pangan di sektor industri domestik Jepang. Korea lebih berperan sebagai eksportir bahan-bahan mentah khususnya pangan ke wilayah Jepang. Jadi dapat dikatakan pada masa itu, Korea merupakan *Lumbung Pangan* Jepang. (McNamara., 1990: 37) Letak Korea yang strategis dan dekat dengan Jepang menjadikan alasan utama mengapa Korea menjadi basis dari industri agraris Jepang, yaitu untuk mempermudah pendistribusian produk-produk pangan. Sistem masyarakat dan kebudayaan agraris Korea telah berkembang sejak zaman kerajaan Silla sehingga mempermudah Jepang dalam mengembangkan industri pertanian serta pengeksploitasian sumber daya yang ada di Korea.¹³ (Nasution, 1965: 3)

Periode kedua, yaitu periode tahun 1930-an, pemerintah Jepang mulai memperluas basis industrinya di Korea terutama sektor manufaktur dan bahan mentah. Selain itu, akibat dari munculnya gerakan-gerakan rakyat yang menuntut kemerdekaan, perubahan kebijakan Jepang terhadap Korea juga dipengaruhi oleh adanya pergeseran politik domestik Jepang. Pada tahun 1926, di Jepang terjadi perubahan rezim, rezim *Taisho* digantikan rezim *Showa* yang militeristik dan

¹³ Pada zaman kerajaan Silla, pengembangan dibidang pertanian dan perternakan telah mengalami perkembangan pesat dengan dibangunnya sistem irigasi, namun kebudayaan feodal pun turut berkembang dimasa itu.

memiliki rencana untuk mengadakan ekspansi ke Manchuria dan Cina. Pada tahun 1930-an dapat dikatakan bahwa Korea menyerupai “*military industrial complex*” untuk memberikan pasokan militer bagi kekuatan Jepang. (McNamara, 1990: 36) Pemerintah Jepang memberikan perintah kepada perusahaan besar Jepang atau yang disebut juga *Zaibatsu* untuk mengalihkan operasi industrinya ke Korea, seperti Mitsubishi, Yazuda dan Sumimoto. Selama kurun waktu 1930-1940 ini sektor industri meningkat terutama dalam bidang industri berat, kimia, dan pertambangan.

Terjadinya pemberontakan pada tahun 1920-an yang dilakukan oleh rakyat Korea pada pemerintah Jepang, juga menjadi alasan utama pemerintah Jepang menjadikan Korea Selatan sebagai basis militernya. Tekanan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Jepang membangkitkan perlawanan rakyat Korea untuk memperoleh kemerdekaan dan bebas dari tekanan Jepang. Pemberontakan itu sebenarnya terbagi menjadi dua basis yaitu gerakan nasional kultural yang lebih menitik beratkan perlawanan pada pengembangan pendidikan rakyat Korea, mereka menggunakan kapitalisme Barat sebagai acuannya. Sedangkan kaum nasionalis sosial lebih memusatkan perjuangannya pada bidang militer. Sebenarnya perlawanan rakyat Korea sudah dimulai sejak tahun 1907, namun puncak dari perlawanan rakyat Korea adalah pada tanggal 1 Maret 1919 yang dikenal dengan istilah “*Samil Undong*”.¹⁴ Pada hari ini hampir dua juta penduduk Korea melakukan demonstrasi dan perlawanan besar-besaran di bawah kepemimpinan seorang tokoh bernama Kim Il Sung. Pemogokan rakyat Korea

¹⁴ *Samil Undong* merupakan kata dalam bahasa Korea yang merujuk pada 3-1, *sam* (삼) yang berarti tiga, *il* (일) yang berarti satu dan *undong* (운동) yang berarti gerakan, jadi *samil* itu menunjukkan tanggal 1 Maret yang merupakan hari pemberontakan rakyat Korea.

berlanjut dan terjadi di mana-mana, dimulai dengan pemogokan di Wosan pada permulaan tahun 1929, kemudian pemogokan di pabrik tekstil Pusan. Dengan bangkitnya gerakan massa tani dan buruh, bertambah kuat pula gerakan revolusioner rakyat Korea menghadapi imperialisme Jepang. Pemerintah Jepang menggunakan kekuatan militer cukup besar untuk membubarkan gerakan ini yang akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya kekuatan militer Jepang [terutama senjata] hingga setelah itu, Jepang mulai melakukan transformasi industri di Korea pada tahun 1930-an.

Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, menyatakan berakhirnya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir banyak negara-negara yang menyatakan kemerdekaannya, termasuk Korea Selatan. Pasca Perang Dunia, negara-negara yang baru merdeka mengalami revolusi untuk membersihkan pemerintahan yang ada dari sisa-sisa kolonial dan membentuk pemerintahan baru yang bersih. Namun, Korea tidak mengalami masa revolusi itu.

Berakhirnya PD II dengan menyerahnya tentara Jepang setelah Nagasaki dan Hiroshima di bom atom oleh angkatan udara Amerika Serikat, negara Korea yang semula dianeksasi Jepang secara otomatis jatuh ke tangan sekutu. Kesepakatan-kesepakatan negara sekutu tanpa melibatkan bangsa Korea membagi wilayah semenanjung Korea menjadi dua wilayah, utara dibawah Uni Soviet dan Selatan dibawah kekuasaan Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat Korea pecah menjadi Korea Selatan yang menganut kapitalis dan Korea Utara yang menganut sistem komunis.

Selama tiga tahun di bawah pemerintahan militer Amerika Serikat, Amerika Serikat tidak menyetujui usaha unifikasi negara dan bangsa Korea. (Mas'ood, 2007: 29) Posisi Korea Selatan yang merupakan persaingan antara dua sistem ekonomi yang berbeda, yaitu antara kapitalis yang didukung Amerika Serikat dan Komunis dengan dukungan dari Uni Soviet, membawa keuntungan tersendiri bagi Korea Selatan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Pembangunan nasional Korea Selatan berlangsung sedikit demi sedikit berdasarkan prinsip politik demokrasi dan prinsip ekonomi kapitalisme. Korea Selatan menerima bantuan secara besar-besaran dari Amerika Serikat berupa bantuan militer dan ekonomi. Pasukan Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai penyeimbang kekuatan militer Korea Selatan yang kekuatannya jauh di bawah Korea Utara.

Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan. Sampai pertengahan 1960-an, ketika Korea Selatan masih miskin dan dalam tahap sebagai negara berkembang, hubungan Korea dengan Amerika Serikat adalah sebagai negara donor. Selama periode tahun 1953 sampai 1962, bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap Korea Selatan mencapai 95% (Mason, 1980: 93) Korea merupakan negara terbesar ketiga penerima bantuan negara, setelah Vietnam dan Israel.

Bantuan luar Negeri Amerika Serikat ini sangat diperlukan oleh Korea Selatan karena setelah terjadi Perang Korea tahun 1950-1953. Karena setelah ada perpecahan pembagian antara Korea Selatan dan Korea Utara, mengakibatkan Korea Selatan mendapatkan konsekuensi yang cukup merugikan wilayahnya.

Korea Utara lebih diuntungkan daripada Korea Selatan karena banyak infrastruktur industri banyak terdapat di Utara. Sedangkan semua yang ada dan tersisa di wilayah Selatan 80% mengalami kerusakan parah karena perang. Dengan demikian Korea Selatan memerlukan banyak sekali dana untuk mempertahankan perekonomiannya dan kesejahteraan rakyatnya. Bantuan Amerika Serikat hingga tahun 1960, membantu Korea Selatan dalam membeli mesin-mesin industri dan bahan baku yang digunakan untuk membangun industri-industri padat karya dengan cepat.¹⁵ Sedangkan bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1961-1970 sangat membantu Korea Selatan dalam membiayai sebagian dari impor terutama barang-barang modal (*capital goods*) seperti bahan baku, bahan kimia dan mesin-mesin serta peralatan transportasi. Korea Selatan mengarahkan impor untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan bantuan Amerika Serikat membantu biaya modalnya (Mason, 1980: 96).

Selain dalam bentuk dana, bantuan Amerika Serikat kepada Korea Selatan juga berupa toleransi terhadap kebijakan ekonomi yang sangat proteksionis yang membendung masuknya modal asing, termasuk modal dari Amerika Serikat. Ketika Korea Selatan melakukan proteksi yang tinggi untuk melindungi proses industrialisasinya yang masih muda, pemerintahan Amerika Serikat tidak menghalanginya. Selain itu, Amerika Serikat merupakan pasar potensial bagi industri barang-barang ekspor dari Korea Selatan. Pada tahun 1960-an, barang-barang ekspor dari Korea Selatan bebas masuk ke Amerika Serikat (Mason, 1980: 103).

¹⁵ Industri padat karya adalah industri yang lebih dititikberatkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan atau pengoperasiannya.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Sekutu (Amerika Serikat) itu mencegah masuknya pengaruh komunis di negara Korea Selatan, karena Amerika Serikat ingin Korea Selatan menerapkan ideologi kapitalisme dan demokrasi sendiri dan bukan menerapkan sistem komunisme. Dengan demikian, pemerintahan militer Amerika Serikat sementara ini telah meletakkan suatu landasan yang memungkinkan negara Korea Selatan dapat berkembang menjadi salah satu negara dengan sistem dunia Barat yang berdasarkan demokrasi dan liberalism.

Dengan bantuan Amerika Serikat, pada tanggal 15 Agustus 1948, Presiden Rhee Syngman mendirikan Republik Pertama di Korea. Selama pemerintahan Presiden Syngman Rhee (1948-1960) tidak ada strategi pertumbuhan ekonomi yang terartikulasi dengan baik selain peningkatan produksi dalam negeri untuk menggantikan barang-barang impor. Minat Presiden Rhee sendiri lebih cenderung mengacu dalam bidang politik, sedangkan kebijaksanaan ekonomi pemerintahannya terpusat pada substitusi impor yang didasarkan pada nilai tukar yang terlalu mahal (*over-valued exchange rate*) dan mengandalkan pada bantuan luar negeri dari Amerika Serikat. Akan tetapi, Secara perlahan industri tradisional Korea Selatan juga mulai ikut bangkit, seperti industri tekstil, pengilangan tepung dan pabrik gula. Presiden Rhee Syngman juga memberikan modal kepada para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Para pengusaha ini merupakan orang-orang yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan akses terhadap devisa, kredit bank dan bantuan luar negeri diliputi dengan korupsi dan kolusi.

Strategi yang diterapkan oleh Rhee Syngman ini sangat menguntungkan untuk para pengusaha. Bisnis para pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan Rhee Syngman dapat berjalan sukses, sebagian diperoleh berkat proteksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap produksi domestik dari kompetisi barang impor melalui pembatasan kuantitatif barang impor. Sisi negatif dari kebijakan perekonomian Rhee Syngman memberikan kesempatan untuk para pengusaha untuk memperkayai diri dengan melakukan korupsi dan kolusi dengan para pejabat. Dapat dikatakan, di satu sisi para pejabat dan pengusaha hidup dengan sejahtera sedangkan di sisi lain rakyat Korea Selatan hidup dalam ketidakbahagiaan dan kemiskinan. Terbatasnya pasar dalam negeri juga menjadi persoalan penting di masa pemerintahan Rhee Syngman. Konflik politik dan perang saudara dengan Korea Utara, dari tahun 1950 sampai 1953 semakin memperburuk perekonomian Korea Selatan. Pada masa itu, Amerika Serikat pun sempat menarik pasukannya dari Korea Selatan. Akhirnya pada 19 April 1960, mahasiswa melakukan pemberontakan besar-besaran yang menggulingkan kekuasaan Presiden Rhee serta menuntut agar para pengusaha dan pejabat korupsi tersebut dihukum berat (Byung Nak, Song. 1997: 90).

Jatuhnya Presiden Rhee Syngman digantikan oleh Perdana Menteri Chang Myon. Masa kekuasaan Perdana Menteri Chang Myon dapat dikatakan merupakan masa kepemimpinan tersingkat di Korea yang berlangsung kurang dari satu tahun. Chang Myon merupakan seorang negarawan yang jujur, liberal, dan demokratis namun bukanlah seorang politikus yang berkemampuan tinggi. Chang Myon tidak mampu mengatasi kekuatan oposisi dan tidak bisa mengatasi krisis

dalam waktu yang tepat. Walaupun Chang Myon dapat digolongkan sebagai seorang pemimpin yang demokratis dan kekuatan politiknya (Mas'ood, 2007: 62).

Chang Myon yang pernah mengenyam pendidikan Barat ini, tampil sebagai pemimpin yang jujur, bersih, mengutamakan keadilan dan menolak nepotisme serta mengutamakan prinsip dan ide demokrasi. Perdana Menteri Chang Myon menghormati prosedur demokratisasi dalam kegiatan-kegiatan partai politik, legislatif, pers, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Namun usaha Chang Myon untuk melaksanakan demokratisasi mengalami kegagalan karena upaya demokratisasi ini tidak diringi dengan upaya untuk menciptakan landasan yang kuat dalam masyarakat Korea sebagai dasar penerapan sistem demokrasi.

Perdana Menteri Chang Myon juga kurang tegas dalam membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Sikap tersebut membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya semakin berkurang dan pada akhirnya mendorong dilakukannya kudeta militer untuk menjatuhkan kekuasaan Perdana Menteri Chang Myon. Sehingga tidak ada perubahan kehidupan ekonomi yang signifikan yang terjadi pada masa kepemimpinan Chang Myon. Akhirnya, pada awal tahun 1960, tampil Park Chung Hee sebagai pengganti Chang Myon sebagai presiden Korea Selatan yang akan menjadi tokoh penting pelopor perkembangan perekonomian Korea dalam bidang industri (*Ibid.*, 63).

BAB III

PARK CHUNG HEE DAN KEBIJAKANNYA DALAM MEMERINTAH KOREA SELATAN

3.1 Pengenalan Mengenai Park Chung Hee

Park Chung Hee adalah presiden ke-3 Korea Selatan. Dia memerintah sejak tahun 1961 hingga 1979. Selama memerintah, Park Chung Hee banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan perekonomian yang berkaitan dengan industrialisasi di Korea Selatan. Kebijakan-kebijakan ini membantu Korea Selatan untuk mengembangkan industrialisasi yang mendorong Korea Selatan menjadi salah satu Macan Asia.

Park Chung Hee meninggal pada tanggal 26 Oktober 1979 karena dibunuh oleh Kim Jae Kyu. Setelah Park Chung Hee meninggal, dia dianggap sebagai ikon budaya perekonomian Korea Selatan. Hal ini berkaitan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Park Chung Hee selama memerintah menjadi dasar pertumbuhan perekonomian Korea Selatan hingga dimasa yang akan datang. Berkembang citra Park Chung Hee setelah kematiannya yang berbeda dengan citra Park Chung Hee setelah kematiannya yang berbeda dengan citra sebelum ia berkuasa. Dari prajurit antinasionalis, pengikut aliran komunis menjadi diktator fasis hingga dianggap sebagai manusia dengan kemampuan dewa dan menjadi pahlawan nasional Korea Selatan.

3.1.1 Kepemimpinan Park Chung Hee

Park Chung Hee dikenal sebagai tokoh dominan dalam sejarah Republik Korea, terutama dalam peranannya memajukan perkembangan modernisasi Korea Selatan di bidang ekonomi dan industri. Park Chung Hee membangun galangan kapal, industri berat, jalan bebas hambatan, dan berbagai pabrik. Pada masa dia memerintah, pendapatan perkapita Korea Selatan meningkat sepuluh kali lipat dari 100 US\$ pada tahun 1961. Dia mengambil alih pemerintahan Korea Selatan di masa pemerintahan Syngman Rhee yang pada saat itu dipimpin oleh perdana menteri bernama Chang Myon dengan melakukan kudeta militer tanpa pertumpahan darah pada tahun 1961. Setelah Presiden Syngman Rhee mengundurkan diri dan Park Chung Hee berhasil menggulingkan Perdana Menteri Chang Myon, akhirnya ia diangkat menjadi Presiden Korea Selatan. Park Chung Hee memerintah Korea Selatan pada saat masa transisi krisis ekonomi yang dialami negara itu. Dalam kepemimpinannya, Park Chung Hee mengangkat perekonomian Korea Selatan guna memerangi angka kemiskinan yang terjadi dengan segala kebijakannya maupun bentuk kemimpinannya yang radikal sehingga pada masa pemerintahannya Korea Selatan mengalami perkembangan perekonomian secara pesat. Hal ini dilakukan Park Chung Hee untuk menghadapi Korea Utara yang bertujuan untuk memporak porandakan Korea Selatan dan membangun Korea Selatan yang memiliki kedaulatan yang kuat.

Pribadi yang keras dan sederhana, Park Chung Hee tumbuh karena mengalami perkembangan ekstrim dalam pembentukan kepribadiannya melalui dua dunia yang sangat bertolak belakang di masa mudanya, yaitu bentuk tradisional dan modern. Bentuk tradisional yang menanamkan sisi kesederhanaan

Park Chung Hee didapatkan dari tumbuh dan berkembang dalam keluarga besar yang sederhana. Selain itu, kebutuhan keluarganya yang mengharuskan Park Chung Hee bersikap disiplin. Dia juga mengenyam pendidikan sekolah Jepang di luar desa tempat tinggalnya yang membuat Park Chung Hee memiliki pribadi yang keras.

Park Chung Hee menjabat sebagai presiden dari tahun 1961 hingga 1979. Dia menjadi tokoh yang terkenal sebagai pemrakarsa pembangunan nasional dengan kesuksesannya untuk memodernisasikan Korea Selatan dengan pesat melalui pertumbuhan ekspor, juga kemampuannya mempertahankan negara dari negara komunis Korea Utara dengan bantuan armada perang Amerika.

Park Chung Hee sempat mendapatkan kritik dan kecaman dari kalangan domestik dan internasional merujuk kepada kepemimpinannya yang otoriter dan diktator kepada media maupun pelajar. Park Chung Hee juga mendapat cibiran karena dia dinilai sebagai presiden anti nasionalis karena dia mengadaptasikan tehnik industri Jepang dalam perekonomian Korea, walaupun dia tahu sebagian besar rakyat Korea masih memiliki luka yang besar mengingat saat kependudukan Jepang di tanah Korea. Kepemimpinan Park Chung Hee berakhir dengan pembunuhan yang menimpa dirinya pada tahun 1979. Namun di balik semua kritik yang dia dapatkan, hingga saat ini Park Chung Hee dihormati sebagai pemimpin yang paling efektif dan Bapak perkembangan ekonomi yang luar biasa di Korea Selatan. Pada tahun 1999, Park Chung Hee masuk dalam artikel majalah TIME sebagai salah satu dari “Para Tokoh Asia yang Paling Berpengaruh Abad Ini” dan untuk mengenangnya, pada tahun 2005 peristiwa pembunuhan Park Chung Hee juga diabadikan dalam sebuah film semi dokumenter berjudul “그때

그사람들/"Geuddae geusaramdeul/The President's last bang/ Tembakan terakhir Untuk Sang Presiden" yang disutradarai oleh Im Sang Soo yang memberikan royalti 100 juta won kepada keluarga Park Chung Hee.¹⁶

3.1.2 Biografi Park Chung Hee (1917-1979)

Park Chung Hee (박정희) lahir di Seosan, sebuah kota kecil di Gumi (구미시), provinsi Gyeongsangbuk (경상북도) dekat dengan Daegu (대구), Korea Selatan. Park Chung Hee lahir pada tanggal 30 September 1917 sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara dalam sebuah keluarga yang sederhana. Ayah Park Chung Hee bernama Park Song Bin merupakan seorang bangsawan di daerahnya, namun keinginan Park Song Bin menjadi tentara dan masuk militer membuatnya harus membuang seluruh warisannya hingga jatuh miskin (Chon, Inkwon, 2006: 22). Faktor kemiskinan ini merupakan faktor yang membuat Park Chung Hee terbiasa dan tumbuh dengan segala bentuk kesederhanaan. Berbeda dengan para saudaranya, tubuh Park Chung Hee yang tergolong kecil membuatnya mengidolakan sosok tentara dalam fisik dan kepribadian, dan hal ini yang menjadi dasar mengapa Park Chung Hee mendedikasikan dirinya dalam bidang militer.

Semenjak kecil, Park Chung Hee merupakan murid yang sangat pintar dan berbakat. Guru Park Chung Hee kemudian merekomendasikannya untuk masuk

¹⁶ Judul asli film ini "Tokoh pada masa itu" merujuk kepada lagu Korea yang terkenal dengan judul yang sama "Tokoh pada masa ini"/"The Person of those Days". Sesuai dengan yang ada pada situs resminya (<http://koreanfilm.org/imss.html>), lagu ini ditampilkan oleh Sim Soo Bong yang diundang pada pesta di malam pada saat Park Chung Hee dibunuh. Namun, didalam filmnya ,Sim Soo Bong dimasukan sebagai pemain khusus dengan menampilkan lagu enka (lagu tradisional Jepang layaknya keroncong).

dalam sekolah elit untuk guru yang berada di Daegu.¹⁷ Rekomendasi ini sempat ditentang oleh keluarga Park Chung Hee dengan alasan faktor ekonomi, namun kakak Park Chung Hee (Park Sang Hui) membujuk keluarganya untuk membiarkan Park Chung Hee mengenyam pendidikan di sekolah elit guru. Park Chung Hee kemudian diterima di Akademi Guru Daegu melalui persaingan ketat dalam ujian masuk, Dia masuk pada tanggal 8 April 1932 dan lulus 23 Maret 1937. Dalam lima tahun pembelajarannya di akademi bersamaan dengan terjadinya invasi Jepang terhadap Cina pada tahun 1931, yang dimulai dengan Insiden Manchuria pada tahun 1931 dan memuncak pada Perang Sino Jepang II tahun 1937. Masa pembelajarannya di akademi dalam bayang-bayang invasi Jepang yang berakibat banyaknya siswa yang dikeluarkan dari akademi karena dianggap berbahaya oleh Jepang yang membuat Jepang bertindak keras bahkan menggunakan kekuatan militer untuk menekan perkembangan ideologi dan nasionalisme Korea.¹⁸ Bentuk keadaan penekanan militer selama pendudukan Jepang membuat Park Chung Hee melihat bahwa hal yang membuat Korea kalah dari Jepang adalah karena penduduk Korea masih sangat acuh pada sekitarnya dan armada militer yang lemah. Ketika di Akademi Daegu ini, Park Chung Hee mulai mengerti betapa pentingnya kekuatan militer dalam pertahanan negara. Dengan memiliki armada militer yang kuat Park Chung Hee percaya bisa membawa Korea pada kemerdekaan dan kedaulatannya sebagai bangsa yang kuat (dikutip dari puisi yang ditulis Park Chung Hee yang prihatin melihat keadaan bangsanya yang

¹⁷ Selama masa kolonialisme, hanya ada tiga sekolah guru di seluruh Korea, satu di Daegu, kedua di Pyong Yang dan ketiga berada di Seoul. (Yi, Su-kwang, 2005: 134. dan Chong, Un-hyon, 2004: 38).

¹⁸ (Menurut penjabaran Chong Yong-jin, banyak murid yang dikeluarkan dengan semakin ditekannya peraturan pendidikan masa pendudukan Jepang di Korea. Bahkan ketika Park lulus pada Maret tahun 1937, jumlah murid yang belajar diturunkan menjadi 70 yang pada awalnya adalah 100 murid (Chong, Yong-jin, 1997, Vol. 1: 269).

lemah. (Chon, In-kwon, 2006: 64). Hal ini memantapkan diri Park Chung Hee untuk menjadi seorang tentara. Setelah lulus dari akademi daegu pada tanggal 25 Maret 1937, dia mulai mengajar selama beberapa tahun di Mungyeon (문경읍) (Park Chung Hee mengajar disatu-satunya SD untuk anak Korea di kota Mungyeon. Di SD ini terdapat 10 tenaga guru dan kepala sekolah dengan 500 orang murid (Chong, Yong-jin, 1997: vol. 1: 281).

Pada bulan April 1940, dalam usia 23 tahun Park Chung Hee masuk program pelatihan dua tahun di Divisi Tentara Kekaisaran Manchukuo di Manchuria dengan meminta rekomendasi khusus. Hal ini karena umurnya yang sudah melewati batas umur tertua dari yang sudah ditentukan sebagai syarat mendapatkan program pelatihan militer Manchukuo. Park Chung Hee menyampaikan petisinya pada personil militer Manchukuo dengan bantuan Arikawa Shuichi yang merupakan tentara Jepang yang memuji bakat Park Chung Hee di Akademi Guru Daegu dan Kang Chae Ho yang merupakan penduduk Daegu yang bertugas di militer Manchukuo. Kemudian sesuai dengan kebijakan Jiro Minami, yaitu *sōshi-kaiimei* (mengubah nama dalam bentuk nama Jepang) yang ditetapkan Jepang untuk seluruh rakyat Korea, Park Chung Hee menggunakan nama Takagi Masao sebagai nama Jepangnya. Hal ini karena pemerintah Jepang menganggap nama keluarga Korea adalah nama klan.

Park Chung Hee berhasil menyelesaikan studinya dengan nilai tertinggi pada tahun 1942 yang mengantarkannya untuk dipilih dalam program dua tahun di Akademi Kekaisaran Militer di Tokyo sebagai perwira tentara Jepang. Setelah dia kembali lulus pada tahun 1944, dia ditugaskan menjadi petugas di Divisi Kantogun (prajurit Kanto) yang kemudian dipromosikan menjadi letnan di divisi

infantri tentara Manchukuo, dan ikut serta dalam Perang Dunia II bersama Jepang tahun 1945 (*ibid.*, 282).

Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, sesuai dengan rekomendasi kakak laki-lakinya, Park Chung Hee bergabung dengan salah satu kelompok komunis berpengaruh, Partai Buruh Korea Selatan (Yi, Su-kwang, 2005: 65-66). Park Chung Hee ikut serta dalam pemberontakan di Jeollanamdo (Provinsi Selatan Jeolla (전남) di barat daya Korea) yang dipimpin oleh tentara bantuan Amerika. Setelah pemberontakan itu Park Chung Hee ditangkap dan diadili. Berdasarkan putusan pengadilan militer, Park Chung Hee dijatuhi hukuman mati. Namun, dia dapat terhindar dari hukuman mati dengan instruksi dari Syngman Rhee selaku presiden pertama Korea yang didukung oleh penasihat militer Amerika bernama James Hausman. Syngman Rhee memberikan penawaran pertukaran informasi mengenai nama-nama para komunis yang terlibat bersamanya dalam ketentaraan pihak Korea Selatan. Kemudian dia dilepaskan dan dibebastugaskan dari ketentaraan secara tidak terhormat. Namun, dia dipanggil kembali untuk ikut serta dalam militer saat pecahnya Perang Korea pada bulan Juni tahun 1950.

Tahun 1953, sebagai tahun akhir Perang Korea, pangkat Park Chung Hee naik menjadi Brigadir Jenderal. Selanjutnya dia dipromosikan sebagai Komandan Jenderal pada tahun 1957, hingga akhirnya dia menjadi komandan deputy seluruh Tentara Korea Infantri II. Dalam waktu yang sangat singkat reputasinya melonjak naik di kalangan perwira muda.

Akhir tahun 1950, demo anti pemerintah terhadap korupsi di kepemimpinan Syngman Rhee melatarbelakangi mundurnya Syngman Rhee pada

tahun 1960. Chang Myon yang menjabat perdana menteri Korea Selatan memimpin dengan sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan Chang Myon tidak bertahan lama dengan adanya kekacauan dan demonstrasi mahasiswa besar-besaran saat itu, hingga akhirnya Park Chung Hee memimpin kudeta pada tanggal 16 Mei 1961.

Park Chung Hee mendeklarasikan UU Militer dan selanjutnya pada pemilihan presiden, dia terpilih sebagai presiden baru Korea Selatan pada Oktober 1961. Kemudian secara resmi pemerintahan ketiga Korea selatan berdiri pada 17 Desember 1963. Komite Revolusioner didirikan beserta dengan Dewan Tinggi Rekonstruksi Nasional untuk melatih kekuatan legislatif dan administratif pemerintahan saat itu. Sejak awal, pemerintahan Park Chung Hee mengacu pada kebijakan pro-industralisasi. Dari arah kebijakannya, Park Chung Hee mampu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Korea dari krisis ekonomi yang melanda dalam waktu yang cukup singkat. Namun, tidak semua kebijakan Park Chung Hee berjalan lancar. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa bentuk kebijakan yang dianggap radikal karena lebih memasukan campur tangan pihak asing dalam perekonomian Korea Selatan. Hal ini juga ditambah dengan bentuk kepemimpinan Park Chung Hee yang semakin lama merujuk pada kediktatoran terutama dengan pembatasan media massa dalam menyampaikan informasi dan juga hukuman berat bagi siapapun yang menentangnya. Terutama setelah dia mengajukan dirinya sebagai presiden seumur hidup (Yi , Su-kwang, 2005: Vol. 3. 7).

Pada tanggal 26 Oktober 1979, Park Chung Hee tewas ditembak oleh Kim Jae Kyu, pemimpin Badan Pusat Intelejen Korea, atas nama pengembalian

demokrasi di Korea Selatan. Dengan tewasnya Park Chung Hee, secara resmi pemerintahan Park Chung Hee pun berakhir. Park Chung Hee kemudian dimakamkan di Pemakaman Nasional Seoul karena dianggap membangun dasar perekonomian Korea Selatan (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/317891/KimJaeKyu?anchor=ref28610>).

3.2 Program dan Kebijakan Perekonomian Masa Pemerintahan Park Chung Hee

Pada masa awal kemerdekaannya (1945-1950) , di Korea Selatan menganut sistem perekonomian bebas. Pada tahun 1950-an, Korea Selatan juga terbelakang dalam bidang agraris sangat bergantung pada bantuan asing khususnya Amerika Serikat dan Jepang. Korea Selatan baru melaksanakan industrinya pasca Perang Korea (1950-1953). Sekitar tahun 1960-an industri di Korea Selatan cukup mengalami perkembangan, tetapi industrinya hanya tertuju pada pasar domestik saja. Dampaknya Korea Selatan terus mengalami inflasi yang melumpuhkan perekonomiannya. Berakibat pada meningkatnya harga bahan baku yang mempengaruhi biaya produksi. Rendahnya daya beli pasar domestik menyebabkan produksi nasional mengalami keterpurukan. Masalah lainnya adalah tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga Korea Selatan sulit mengejar pertumbuhan ekonomi.

Selama pemerintahan Syngman Rhee, masalah pengembangan ekonomi kurang diprioritaskan. Presiden Rhee lebih menekankan pada kebijakan pemerintah pada masalah penyatuan Korea. Banyak kebijakan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan ekonomi diabaikan oleh Syngman Rhee sehingga

menyebabkan Korea harus hidup dengan bantuan luar negeri yang sifatnya sementara (Woronoff, 1983: 27).

Di tengah situasi yang kacau itu, Park Chung Hee muncul sebagai seorang pemimpin yang mengambil alih kekuasaan negara. Berbeda dengan pendahulunya, Park Chung Hee tidak menekankan kebijakannya pada penyatuan Korea, tetapi pada kemajuan ekonomi sebagai tujuan utamanya (*Ibid.*, 28). Pemerintahan model militer Park Chung Hee dikenal dengan istilah *administrative democracy* (demokrasi administratif) yang menekankan tujuan pembangunan negaranya pada beberapa hal, yaitu pemberantasan korupsi, memperkuat kemampuan mandiri masyarakat dan membangun keadilan sosial. Dalam program pembangunan ekonominya, Park Chung Hee menitikberatkan pembangunan ekonomi dalam bidang industri dengan adanya intervensi negara yang kuat.

Menurut Park Chung Hee, "*Guide capitalism* atau kapitalisme terpimpin merupakan suatu sistem manajemen ekonomi yang dirancang untuk menciptakan perekonomian yang dapat memberi pemerataan pendapatan dan bermanfaat untuk masyarakat". Park Chung Hee sangat menjunjung tinggi ide kesetaraan dalam pendistribusian dan persaingan bebas. Dia melihat bahwa pemerintah memiliki peran dalam memprogram pengembangan ekonomi nasional seperti mengawasi dan mengatur jalannya industri sehingga setiap masyarakat mempunyai peluang untuk berkompetisi secara bebas (*Ibid.*).

Tantangan besar Park Chung Hee dalam menerapkan kebijakan ekonomi adalah membangun sebuah sistem birokrasi baru. Sebuah sistem pemerintahan yang berkiblat pada pendidikan Barat dan menganut sistem militer. Sejumlah kalangan terpelajar diikutsertakan dalam pengembangan program pemerintah. Pada waktu

yang bersamaan, Park Chung Hee juga melakukan pembersihan kabinet dengan memecat sebagian besar pejabat senior yang dianggap bermasalah.

Pada tanggal 22 Juli 1961, pemerintah mengeluarkan rancangan program pembangunan ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan “Rencana Pembangunan Lima Tahun”. Tiga ekonom muda Kim Songbom (37tahun), Chong Soyong (29 tahun) dan Paek Yongchan (32 tahun) dalam waktu 80 hari menyelesaikan draf rancangan ekonomi pembangunan lima tahun. Berdasarkan rancangan mereka, Park Chung Hee pada pembangunan lima tahun pertama, menjalankan perekonomian dengan berkiblat pada sistem kapitalis (Kim, Hyung-A. 2004 : 80). Park Chung Hee membangun hubungan pemerintah dan masyarakat bisnis seperti hubungan antara guru dan murid sesuai dengan ajaran Konfusianisme dengan memasukkan unsur militer. Selama periode tahun 1962 sampai 1966, tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan Park Chung Hee ini adalah memastikan keefektifan distribusi sumber daya dan mencapai kemandirian ekonomi melalui industrialisasi yang menjadi struktur utama ekonomi Korea Selatan tahun 1960-an. Berdasarkan rancangan pembangunan ini menunjukkan bahwa negara bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2% per tahun dan dapat meningkatkan perekonomian Korea Selatan dengan melaksanakan ekspor, mengembangkan industri yang dapat mengganti barang-barang impor dan meningkatkan neraca pembayaran dengan meningkatkan masuknya mata uang asing.

Adapun sasaran dasar rencana lima tahun, yaitu:

1. Mengamankan sumber daya energi termasuk listrik dan batu bara.

2. Meningkatkan modal tambahan untuk perluasan di bidang sosial termasuk kereta api dan pelabuhan.
3. Pembangunan industri dasar, seperti semen, pupuk, dan pabrik baja.
4. Perluasan produksi pertanian.
5. Peningkatan neraca pembayaran luar negeri
6. Promosi teknologi (Ministry of Public Information, Republic of

Korea, 1966: 17). Dalam melaksanakan rencana penting itu, modal yang cukup besar untuk membangun sejumlah pabrik merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Korea Selatan. Dalam rangka mengembangkan industri, pemerintahan Park Chung Hee harus mengembangkan rencana utama demi memenuhi modal jangka panjang untuk industri. Pada Agustus 1961, pemerintah melalui bank yang ditunjuk memberikan bantuan dana kepada media dan usaha kecil. Program alokasi kredit ini menunjukkan perubahan signifikan dalam sektor industri (Lee, Yeon-ho, 1997: 20).

Pemerintah Park terus berusaha mendapatkan suntikan dana dari luar negeri. Pemerintah mengatur usaha perencanaan jaminan bank yang sistematis dan terpadu untuk para pengusaha. Bantuan luar negeri mengalami peningkatan yang signifikan, ketika pada tahun 1963 bank pemerintah mendapat bantuan 22 miliar won, di mana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 18,1 miliar won dan angka ini semakin melonjak hingga 70 miliar pada tahun 1966 (*Ibid.*, 20).

Salah satu yang paling penting dari karakteristik kebijakan pembangunan Park Chung Hee adalah memperkuat posisi *Chaebol*, istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok konglomerat di Korea Selatan, dalam perekonomian

Korea dan melibatkan mereka dalam pengembangan program ekonomi Korea. Park Chung Hee membangun hubungan antara komunitas bisnis dan pemerintah seperti hubungan guru dan murid seperti dalam ajaran Konfusianisme dengan memasukan unsur militer. *Chaebol* merupakan grup bisnis yang besar di bawah satu manajemen yang dikontrol oleh manajemen keluarga. Dapat dikatakan *Chaebol* memiliki sistem seperti *Zaibatsu* yang dikembangkan pada zaman Meiji. *Chaebol* terbentuk kira-kira setelah masa kekuasaan Jepang berakhir di Korea. Aset yang dimiliki oleh *Chaebol* berawal dari aset perusahaan Jepang yang nantinya berkembang menjadi perusahaan besar di Korea. Perusahaan-perusahaan Korea ini terbentuk kira-kira pada akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an dan pada umumnya mereka memiliki hubungan yang erat dengan Syngman Rhee (Kang, Myun-hun, 1966: 12). Banyak perusahaan yang mendapat bantuan dari pemerintah dengan cara memberikan suap kepada pejabat-pejabat negara. Pada masa awal pemerintahan Park Chung Hee, diperkirakan ada 51 *Chaebol* yang di tangkap dengan tuduhan melakukan suap pada pemerintah dan menyita harta kekayaan mereka. Akan tetapi, di satu sisi Park Chung Hee sangat menyadari bahwa pemerintah juga memerlukan bantuan dari pengusaha untuk melaksanakan rencana pembangunan ekonomi Korea. Para pemimpin *Chaebol* ini kemudian dibebaskan setelah ia menandatangani perjanjian yang menyatakan: "Saya akan menyumbangkan semua harta saya ketika pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan bangsa". Pada kenyataannya, sebagian besar *Chaebol* Korea diberikan pembebasan bersyarat dan kebebasan mereka tergantung pada kinerja bisnis dan kerjasama mereka dengan pemerintah (Lee, Byeong-cheon, 2003: 121). Sebagai imbalannya, pemerintah Park menawarkan kapitalisme sebagai langkah

perluasan industri, seperti perlindungan dan hak istimewa, termasuk jaminan pinjaman luar negeri, subsidi keuangan, perlindungan dari perserikatan independen dan sistem upah tetap. Langkah-langkah ini memungkinkan *Chaebol* untuk melaksanakan program industrialisasi secara besar-besaran.

Pada Juli 1961, 13 *Chaebol* yang dinyatakan bersalah membentuk Komite Promosi untuk Rekonstruksi Ekonomi, pendahulu Federasi Industri Korea (FKI). Tujuan FKI adalah melaksanakan program pengembangan industri dengan membuat rencana 6 industri penting yaitu: semen, serat sintesis, perlistrikan, pupuk, kilang minyak, dan besi. Industri-industri tersebut akhirnya ini dibagi untuk tiga belas *Chaebol* dan diputuskan bahwa industri ini dikelola langsung di bawah pengawasan pemerintah. (*Ibid.*, 111).

Chaebol-chaebol lain juga sangat aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi selama periode rencana pembangunan lima tahun. Kerjasama pemerintah dan *Chaebol* menciptakan keberhasilan yang menakjubkan di awal tahun 1960. Pemerintahan Park Chung Hee membuat rancangan untuk perluasan industri dan para *Chaebol* sangat menyadari rencana tersebut. Namun, industrialisasi yang dipimpin oleh *Chaebol* yang mempercepat ekonomi monopolistik¹⁹ dan oligarkis²⁰ ekonomi di Korea. Pertumbuhan yang luar biasa yang dialami *Chaebol*

¹⁹ Ekonomi monopolistik merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya. Sedangkan unsur persaingan pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Contohnya produk sabun yang memiliki keunggulan misalnya untuk kecantikan, kesehatan. Ciri-cirinya adalah terdapat banyak penjual/produsen yang berkecimpung di pasar, barang yang diperjual-belikan merupakan *differentiated product*, para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri, untuk memenangkan persaingan setiap penjual aktif melakukan promosi/iklan dan keluar masuk pasar barang/produk relatif lebih mudah.

²⁰ Oligarkis adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-ciri dari pasar oligarkis adalah terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai pasar barang yang diperjual-belikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak (*differentiated product*), terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar, satu di antaranya para

telah meningkatkan ekspansi sektor ekspor Korea Selatan. Selama periode tahun 1962 dan 1966, 72,2% dari modal yang dibutuhkan diambil dari sumber-sumber domestik dan 27,8% dari luar negeri. Pemerintah mengambil alih 55,6% dan sektor swasta mengambil 44,4%. Pemerintah juga menemukan beberapa cara untuk memaksimalkan penggunaan modal dalam negeri dan sepenuhnya memanfaatkan pekerjaan rumah tangga dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan (*Ibid.*, 81).

Salah satu fitur penting dari pengembangan industri Park Chung-Hee adalah program regulasi kapital, pada 18 Juli 1961 diumumkan sebagai kebijakan ekonomi darurat. Kebijakan ini mendorong investasi modal asing di Korea. Kebijakan ini menyatakan pentingnya modal asing untuk perkembangan pesat industri dalam negeri. Pemerintah Park menyadari bahwa peraturan sebelumnya mengenai modal asing tidak layak untuk pencapaian tujuan rencana pembangunan ekonomi (*Ibid.*, 85). Berdasarkan hukum sebelumnya, hanya warga negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea yang dapat berinvestasi di Korea dan warga negara Korea yang telah tinggal selama lebih dari 10 tahun di Korea. Selain itu, UU menetapkan batas yang lebih rendah bagi investor asing dan membatasi penarikan keuntungan investasi di Korea. Dengan amandemen ini masalah UU pun dapat terselesaikan. Akan tetapi, masalah lain muncul dalam investasi asing, sebagian besar perusahaan swasta Korea kurang percaya diri untuk berinvestasi secara internasional.

oligopolis merupakan price leader yaitu penjual yang memiliki/pangsa pasar yang terbesar. Penjual ini memiliki kekuatan yang besar untuk menetapkan harga dan para penjual lainnya harus mengikuti harga tersebut. Contoh dari produk oligarkis adalah semen dan air mineral (Grossman, 2004 : 89).

Untuk mengatasi masalah ini pada 18 Juli 1962, pemerintah Park mengumumkan Undang-Undang Pinjaman Luar Negeri, yang menyediakan sertifikat jaminan pembayaran untuk semua modal asing dan pinjaman bagi yang mengalami kekurangan modal ekuitas. Di bawah sistem ini, perusahaan Korea yang ingin meminjam di luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perencanaan Ekonomi, yang pada gilirannya meminta persetujuan dari Dewan Legislatif Nasional untuk mendapatkan jaminan pembayaran pinjaman luar negeri. Jika telah keluar jaminan resmi, bank Korea mengeluarkan jaminan kepada investor asing sedangkan Bank Pembangunan Korea mengeluarkan jaminan Bank Korea. Peminjam utama berkomitmen untuk membayar pinjaman, tetapi ia mendapat dukungan dari kedua Bank, yaitu Bank Pembangunan Korea dan Bank Korea untuk melunasi pinjaman. Jadi risiko kegagalan melunasi utang diabaikan dan peminjam Korea telah dijamin tidak hanya dari mendapat dukungan dari lembaga perbankan domestik tetapi juga dari bank sentral. Pemerintah Park mendorong investasi asing di Korea. Kemudian, intervensi pemerintah diperluas tidak hanya untuk distribusi modal tetapi juga untuk alokasi sumber daya, distribusi barang-barang manufaktur di pasar domestik dan juga dalam memperbaiki harga barang. Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Park Chung Hee dalam bidang ekonomi, politik dan sosial untuk mendorong kemajuan Korea Selatan. Terutama kebijakan-kebijakan dalam industri yang mendorong kemajuan industrialisasi di Korea Selatan. Melalui cara ini Park Chung-hee membentuk sistem pemerintah yang mengarah pada kapitalisme (*Ibid.*, 91).

Setelah berhasil meraih kekuasaannya inilah, Park Chung Hee mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Korea Selatan. Di bawah kontrol negara yang sangat kuat, Park Chung Hee memulai proses pembangunan negaranya. Upayanya inilah yang berhasil membawa negaranya mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dan menempatkan negaranya sebagai salah satu negara maju di dunia.

3.2.1 Badan Perencanaan Perekonomian (*Economic Planning Board /EPB*)

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan adalah dengan mengarahkan dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk investasi modal, produksi, dan ekspor. Salah satunya peran pemerintah Korea Selatan adalah dengan membentuk Badan Perencanaan Ekonomi (EPB) pada bulan Juni 1961. EPB merupakan lembaga yang didesain oleh Park Chung Hee sebagai pusat koordinasi pembangunan ekonomi. Perencanaan, penentuan anggaran dan pelaksanaan rencana-rencana ekonomi yang dilakukan oleh kementerian-kementerian Perdagangan dan Industri, Keuangan dan Transportasi, Bangunan, Komunikasi serta Pertanian dan Perikanan berada dibawah pengawasan EPB. EPB mempunyai wewenang besar dalam menentukan target-target dari pembangunan ekonomi, seperti investasi, konsumsi, tabungan, tingkat impor dan ekspor serta alokasi-alokasi terinci oleh sektor-sektor dan industri-industri. Wewenang EPB dalam hal ini adalah mengubah besarnya nilai pajak, subsidi, tarif-tarif keperluan umum, mengontrol harga barang-barang

tertentu dan mengubah lisensi impor, penggunaan devisa serta pendirian bisnis baru tanpa memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional (Alexander, 1989:46) .

Selain membawahi kementerian-kementerian penting yang berhubungan erat dengan perekonomian, EPB juga mengendalikan bank-bank komersil. Pemerintah merupakan pemegang saham terbesar sehingga sangat berkuasa dalam menentukan kebijakan perbankan. Hal ini membuat EPB sangat kuat untuk memelihara kondisi pasar dan menekan kaum borjuis Korea Selatan, seperti ketika pada tahun 1979 Presiden Park menjatuhkan konglomerat Yolsan karena mendukung pimpinan oposisi Kim Dae Jung (Cumings, 1984:31). EPB juga mengorganisir informasi-informasi tentang pasar internasional dan perubahan-perubahannya dari laporan yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan ekspor. EPB melakukan survei mengenai pasar, teknologi, dan modal yang diperlukan di seluruh dunia. Hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan para pengusaha yang mengikuti kebijakan pemerintah telah membentuk suatu jaringan internasional di bidang industrialisasi ekspor di Korea Selatan.

EPB bergabung dengan kementerian-kementerian yang terkait dalam usaha untuk pengembangan ekspor, namun Presiden Park juga secara langsung dan terus-menerus mengamati yang terjadi dalam perkembangan di pasar dunia. Lembaga yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan dan Industri, seperti MITI di Jepang. Di Jepang, promosi pembangunan industri ditandai dengan adanya kerjasama antara pengusaha dan pemerintah dan diwakili oleh MITI. Sedangkan di Korea Selatan, organisasi pemerintah bukan diwakili oleh semacam MITI, tetapi dipegang langsung oleh Presiden Park Chung Hee dengan dukungan EPB. Hal ini disebabkan karena

selama periode tahun 1961 sampai tahun 1976, pemerintah Korea Selatan memegang kekuasaan yang sangat besar, yaitu pemerintah mengendalikan para pengusaha dengan hanya mengikuti aturan dari pemerintah sehingga tidak ada sikap oposisi dari para pengusaha.

Selanjutnya pada tahun 1975, melalui menteri perdagangan dan industri juga didirikan perusahaan perdagangan umum (*General Trading Companies/ GTC*). GTC yang pertama dibentuk adalah Samsung Trading Company pada bulan Mei 1975, dan bertambah menjadi tiga belas GTC pada tahun 1976, yaitu Daewoo, Hanil, Kukje, Hyundai, Koryo, Sangyong, Bando, Hyongsung, Kumho, Samwha, Sunkyong, dan Yulsan. Aspek yang penting dari pembentukan GTC ini adalah untuk pelaksanaan dasar kebijakan ekspor Korea Selatan dan kegiatan promosi ekspor. Pemerintah menekan GTC secara terus menerus agar meningkatkan nilai ekspor, dan GTC ini berhasil menaikkan ekspor Korea pada tahun-tahun tersebut sebesar 51,3% (Song, Byung-nak, 1990:102). Namun, pemerintah Korea Selatan tetap memberikan subsidi ekspor, misalnya dengan pengurangan pajak, penurunan tingkat suku bunga dan fasilitas-fasilitas yang memudahkan bagi para pengusaha. Tujuannya agar para pengusaha giat melaksanakan ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Korea Selatan menggunakan jaringan organisasinya untuk merangsang pertumbuhan ekspor yang cepat, yaitu sistem penetapan target ekspor dan penyelenggaraan promosi perdagangan nasional. Target-target ekspor yang mulai diberlakukan pada tahun 1960-an, ditentukan oleh pemerintah bekerja sama dengan para perusahaan ekspor dengan tujuan untuk melihat apa yang diharapkan pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor negara dan menginformasikan

kepada pemerintah tentang kebutuhan dari para perusahaan ekspor agar mereka mampu mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah. Setiap bulannya juga diadakan pertemuan, pertemuan yang melibatkan kalangan menteri di bidang ekonomi, para wakil dari asosiasi-asosiasi ekspor dan para pemimpin *Chaebol* digunakan sebagai forum untuk memantau perkembangan ekonomi yang telah direncanakan (Lee, Byeong-cheon 2003:77). Hasil dari kajian ini akan menjadi dasar dalam penentuan pembuatan kebijakan untuk mendorong perekonomian Korea Selatan.

3.3.2 Kebijakan Berorientasi Ekspor (*Export-Oriented Industrialization /EOI*)

Sejarah industri di Korea sudah berlangsung sejak masa penjajahan Jepang (1910-1945) di Korea. Banyak industri di Korea dibangun untuk menopang ekonomi Jepang. Korea Selatan diuntungkan dengan warisan Jepang berupa sarana-sarana infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, listrik, saluran irigasi, tenaga terdidik dalam industri dan manajemen, dan sejumlah pabrik yang mampu menyediakan suatu basis industri ringan meskipun dalam jumlah dan kekuatan terbatas. Dengan demikian Korea Selatan sudah memiliki basis sosial dan ekonomi yang cukup kuat dan memadai untuk memulai kembali program-program industrialisasi substitusi impornya (*Ibid.*, 88).

Sama seperti negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara Asia Tenggara, Korea Selatan memulai proses pembangunan industrinya atas dasar strategi substitansi impor yang proteksionis, yaitu perusahaan-perusahaan yang dibangun diharapkan dapat memasok barang-barang yang sebelumnya harus diimpor sehingga dapat menghemat devisa negara. Pada masa pemerintahan

Presiden Syngman Rhee proses industrialisasi yang berbasis pada industri substitusi impor mulai bangkit. Pelan-pelan industri tradisional Korea Selatan yang sudah hidup sejak zaman kolonial seperti industri tekstil, pengilangan tepung dan pabrik gula ikut tumbuh. Pada masa ini para *Chaebol* mulai memperoleh modal. Akan tetapi, industri substansi impor Korea Selatan tidak bisa bertahan dengan baik karena industri ini memiliki beberapa hambatan yang berpengaruh pada sektor ekonomi Korea Selatan.

Pertama, ketika pada masa kekuasaan Amerika Serikat, AS melakukan pembaharuan struktur politik di daerah pedesaan dengan mengadakan program *landform*.²¹ Pada awalnya program ini bertujuan mengurangi konsentrasi penguasaan tanah dan kemiskinan di pedesaan. Namun, pada kenyataannya, program ini membuat turunnya produktivitas dibidang pertanian, terhadap produk domestik Korea (Song, Byung-nak, 1997: 109). Saat itu salah satu bidang industri substansi impor Korea Selatan adalah bidang pertanian sehingga dengan melemahnya sektor pertanian membuat ekonomi Korea Selatan mengalami penurunan.

Kedua, industri substansi impor Korea Selatan berkembang dengan adanya dukungan proteksi dari pemerintah seperti bea masuk yang tinggi dan membatasi masuknya jumlah barang impor. Akan tetapi, hal ini justru memperlambat jalannya industri karena Korea Selatan yang membutuhkan bahan baku, dengan kebijakan ini Korea Selatan terpaksa membeli bahan baku dengan harga tinggi untuk melaksanakan produksi. Pada masa itu, daya beli masyarakat

²¹ Dalam program *land form* ini para petani hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga hektar tanah yang menyebabkan persentasi pemilik tanah menurun dari 49% menjadi 7%. Dengan adanya pembatasan kepemilikan atas tanah ini, para tuan tanah yang tanahnya diambil oleh negara diganti dengan dengan kepemilikan saham negara (Hamilton, 1984:39).

Korea dapat dikatakan cukup rendah, hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi Korea Selatan (*Ibid.*, 111). Di masa yang sama, Pemerintahan Syngman Rhee yang korup semakin memporakporandakan ekonomi Korea Selatan.

Setelah Presiden Rhee ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1960, Korea Selatan beralih kepemimpinan di bawah Presiden Park Chung Hee yang menganut sistem militer. Pada masa kepemimpinan Park Chung Hee, pemerintah memiliki campur tangan yang besar dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, Pemerintahan Park berperan aktif mengarahkan sektor swasta, khususnya Chaebol, untuk mewujudkan agenda pembangunan yang disusun oleh pemerintah, berupa pengembangan industri manufaktur, seperti elektronik, otomotif dan semikonduktor (Dwitri Waluyo, Gatra- “Chaebol Berpayung”, <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/05/10/0024.html>).

Awal tahun 1960-an, Korea Selatan merubah perekonomiannya dari industrialisasi subsidi impor ke industri yang berorientasi ekspor. Pergeseran industrialisasi ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama perubahan ini terjadi karena adanya pengurangan bantuan dana dari Amerika Serikat dalam jumlah besar sehingga Korea Selatan harus mencari cara untuk memperoleh devisa. Kedua, perubahan ini diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Korea Selatan hampir menyelesaikan industri substitusi impor dalam bidang barang-barang konsumsi dan produk-produk menengah yang dipakai dalam sektor pengolahan. Sedangkan dalam bidang permesinan dan komponen utamanya tidak mengalami pertumbuhan yang cukup memuaskan karena keterbatasan pasar dalam negeri. Strategi industri berorientasi ekspor ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah ini (Krueger, 1979: 85).

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil dalam mengubah strategi subsidi impor ke industri berorientasi ekspor. Angka ekspor Korea Selatan terus mengalami peningkatan sejak tahun 1962. Industri padat karya Korea Selatan menggunakan tenaga kerja yang murah, tetapi mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar internasional. Antara tahun 1962-1967, ekspor di bidang barang dan jasa naik rata-rata 28,2 % dan terus naik pada periode 1967-1972, yaitu 30,2%. Perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi dan memasarkan produk-produk hampir dari semua bidang seperti makanan, kapal terbang, elektronik, pasta gigi, mobil dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memproduksi barang-barang untuk orientasi ekspor tetapi juga kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi domestik Korea Selatan (Rhee, Yung-whee, 1984: 95).²²

Peningkatan ekspor ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Korea Selatan hingga mengalami pertumbuhan yang cepat. Keberhasilan industri berorientasi ekspor ini memberikan manfaat pada perekonomian Korea Selatan. Pertama, menghasilkan devisa untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan akibat pemberlakuan industri substitusi impor. Kedua, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Tingkat pengangguran di Korea Selatan memperlihatkan penurunan yang terus menerus dari 8% pada tahun 1963 menjadi 3,8% pada tahun 1979. Turunnya tingkat pengangguran juga diikuti dengan naiknya upah riil di sektor pengolahan. Ketiga, meningkatnya kemampuan dan keterampilan teknologi kearah teknologi maju (*Ibid.*, 101).

²² Contohnya seperti Perusahaan Samsung yang memproduksi alat-alat elektronik, Lucky Gold Star (LG) yang memproduksi microcip dan Hyundai yang memproduksi alat-alat rumah tangga.

Korea Selatan di bawah rezim Park Chung Hee berhasil mengubah kegiatan industri yang bergantung pada impor dan bantuan asing menjadi industri yang berorientasi pada ekspor, meskipun pemerintahannya adalah pemerintahan otoriter. Pemerintah berperan dalam mengarahkan dan merangsang perekonomian. Negara mengarahkan dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk investasi modal, produksi dan juga ekspor. Sebagian produk industri yang didukung pemerintah diarahkan untuk pasaran ekspor karena tidak memiliki pasaran dalam negeri. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam hal perkreditan bagi para eksportir. Pemerintah juga mengatur alokasi kredit yang disesuaikan dengan pertumbuhan sektor-sektor industri dan ekonomi yang pada umumnya lebih diprioritaskan. Koordinasi negara yang baik inilah yang mendorong majunya industri orientasi ekspor.

3.2.3 Kebijakan Industri Berat dan Kimia (*Heavy Chemical Industry/HCI*)

Korea Selatan memasuki tahap pembangunan industri yang disebut sebagai pendalaman (*deepening process*) pada paruh kedua dasawarsa 1970-an. Pada masa ini terjadi perubahan orientasi industri yaitu dari industri ringan ke industri berat. Pada tahun 1973 pemerintah memberikan prioritas pada perkembangan industri berat dan kimia, misalnya pembuatan kapal, industri permesinan, baja, mobil, dan petro kimia.

Kemunculan negara-negara industri baru yang mengandalkan ekspor dan meningkatnya proteksi dari negara Amerika Serikat dan Jepang menyebabkan pemasaran produk-produk padat karya Korea Selatan mengalami penurunan. Munculnya krisis minyak pada awal 1970-an juga menimbulkan masalah bagi

perekonomian Korea Selatan, masalah tersebut muncul dengan adanya keterbatasan pertumbuhan ekonomi yang bersandar kepada industri ringan (Yo, Hanjohng, 1989:22).²³ Sebagai solusi terhadap masalah inilah Korea Selatan melaksanakan pembangunan industri berat dan kimia.

Park Chung Hee menjadikan industri berat dan kimia menjadi ujung tombak ekspor industri Korea Selatan (Lee, 2003:93). Hal ini dilakukan untuk membuat kekuatan industri Korea Selatan menjadi lebih kuat dan mandiri. Pengembangan industri berat dan kimia didasari oleh keinginan untuk menghasilkan sendiri barang dan modal, meningkatkan nilai tambah dan usaha untuk transfer teknologi. Dengan mengembangkan industri-industri dasar, diharapkan Korea Selatan dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada impor barang-barang modal dan teknologi khususnya terhadap Jepang dan Amerika Serikat.

Industri berat di Korea Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting. Pertama, adanya rencana penarikan mundur pasukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan presiden Nixon, sebanyak sepertiga dari jumlah pasukan di Korea Selatan pada tahun 1971 dipandang sebagai melemahnya kekuatan politik Amerika Serikat terhadap Korea Selatan. Oleh karena itu, Presiden Park merasa perlu membangun industri yang bisa menunjang sektor pertahanan sehingga tidak bergantung pada Amerika Serikat. Kedua, banyak negara yang melakukan proteksi perdagangan internasional, seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an mulai melakukan kebijakan impor industri ringan ke negara masing-masing. Ketiga, Korea Selatan tidak akan mampu mengatasi defisit

²³ Hal ini disebabkan karena keterbatasan permintaan yang ada dan keterbatasan kemampuan untuk menjadi *leading sector* (sektor pemimpin).

perdagangan dan hutang luar negeri akan terus meningkat jika industri tetap dipertahankan melalui modal asing dan barang-barang antara (*intermediate materials*) sebagai beban biaya produksi. Keempat, krisis minyak pada tahun 1973 dan 1974 akan memukul negara ini dengan ditandai dengan meningkatnya inflasi dan melemahkan devisa negara (Lee Suk Choe, "The Heavy and Chemical Industries Promotion Plan (1973-1979) dalam Kim, Youn-hyung, 1991:438).

Pada masa ini, perhatian pemerintah meningkat pada perusahaan-perusahaan besar. Pengecualian pajak, akses mata uang asing, proteksi sektoral dan kredit lunak sangat membantu para pengusaha (*Chaebol*) dalam menghadapi persaingan internasional (Winanti, 2003, hal.7).

Pada awal pembangunan industri berat dan kimia ini, program ini banyak mengalami tantangan dari para teknokrat, tetapi program ini akhirnya bisa berjalan karena adanya intervensi dari pihak kepresidenan serta mendapat dukungan dari MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) Korea Selatan dan perusahaan-perusahaan besar (*Chaebol*). Selama periode ini, kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mendukung industri, seperti pinjaman dengan bunga rendah, tingkat pajak yang rendah dan dukungan administrasi yang baik untuk mendukung HCI. Selain itu, industri ini mendapat dukungan dari pihak militer karena industri ini berhubungan dengan sumbangannya untuk mendukung kekuatan militer negara (Kuntjoro, 1989:15). Oleh karena itu, rencana ini banyak melibatkan proyek-proyek besar (petrokimia dan baja) sehingga memerlukan bantuan modal dan teknologi dari luar serta meningkatkan hutang negara Korea Selatan.

Para ekonom banyak mengkritik kebijakan-kebijakan ini yang mempertanyakan efektivitas pelaksanaan pembangunan industri berat dan kimia dalam situasi krisis ekonomi saat itu. Seperti ketika pembangunan industri baja di Pohang banyak mendapat tantangan dari Bank Dunia karena dianggap tidak menguntungkan dan harus dibatalkan oleh pemerintah Korea, walaupun akhirnya proyek ini dijalankan dan mengalami kesuksesan. Pabrik besi dan baja Pohang yang dibangun tahun 1973 ini berhasil memproduksi 17,3 ton baja sehingga berhasil menjadikan Korea Selatan menduduki peringkat 14 dari negara-negara penghasil baja di dunia. Industri-industri berat yang dibangun pada masa itu adalah industri baja, industri mesin, galangan kapal, petrokimia, elektronik dan industri mobil. Misalnya Hyundai ditugasi untuk membangun sektor otomotif. Daewoo yang merupakan spesialis di bidang tekstil diperintahkan untuk menangani pembuatan perkakas mesin, membuat kapal dan mobil (Lee, 1997:20). Industri berat dan kimia ini mendominasi kegiatan perekonomian dan menyumbang 50% dari perekonomian Korea Selatan.

Pada tahun 1975, pemerintah Korea Selatan berhasil melewati krisis ekonomi dunia yang terjadi sejak awal tahun 1970-an dan dapat menikmati kembali tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kondisi ini dibantu oleh adanya proses pemulihan ekonomi dunia dan industri berat dan kimia Korea Selatan mendapat banyak order pembangunan konstruksi di Timur Tengah. Pada tahun 1977 proyek Timur Tengah ini nilainya mencapai 1,2 milyar dollar dan meningkat menjadi 2,2 milyar dollar pada tahun 1981. Hal ini semakin memperbesar pertumbuhan ekonomi Korea Selatan selama tahun 1970-an.

Kebijakan ini memang mendukung perusahaan-perusahaan besar, namun di sisi lain mematikan perusahaan menengah dan kecil. Sektor-sektor yang menjadi prioritas kebijakan HCI merupakan sektor-sektor yang berskala besar sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar yang dapat menikmati berbagai hak-hak istimewa, sementara perusahaan-perusahaan menengah dan kecil yang tidak mampu merambah ke sektor-sektor tersebut menjadi tersingkir. Kebijakan HCI membawa konsekuensi semakin lebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin antara perusahaan –perusahaan besar dan kecil. Akibatnya, tuntutan akan perubahan kembali marak diberbagai tempat. Ketidak stabilan politik kembali melanda Korea. Ketidakpercayaan terhadap Park Chung Hee mulai bermunculan bahkan dari orang-orang kepercayaannya. Tuntutan agar Park Chung Hee mundur dari bangku presiden semakin luas. Situasi ketidakstabilan ini berakhir dengan terbunuhnya Park Chung Hee oleh direktur KCIA²⁴, Kim jae KYu yang merupakan tangan kanan Park Chung Hee sendiri pada jamuan makan malam pada tanggal 26 Oktober 1979 diruang KCIA yang masih merupakan bagian dari istana kepresidenan. Kematian park Chung Hee menandai era baru dalam sejarah politik Korea (*Ibid.*, 8).

²⁴ Korean Central Intelligence Agency merupakan lembaga intelijen Korea Selatan.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis di bab sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa kemajuan ekonomi Korea Selatan yang berjalan dengan luar biasa sampai saat ini telah dimulai dari kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Park Chung Hee (1961-1979). Ada tiga kebijakan ekonomi yang dijalankan Park Chung Hee selama memimpin Korea Selatan sehingga mampu membangun kekuatan industri yang begitu luar biasa meskipun tidak didukung oleh sumber daya alam yang memadai. Ajaran Konfusianisme yang telah mengakar pada diri rakyat Korea sejak berabad-abad lalu membuat mereka memiliki loyalitas yang besar kepada negara.

Pengalaman sebagai bangsa terjajah juga mendorong Korea Selatan untuk bangkit dari keterpurukannya. Akan tetapi, di satu sisi penjajahan Jepang juga memberikan pengaruh positif berupa pengetahuan penting tentang industri kepada rakyat Korea. Selama masa penjajahan Jepang, rakyat Korea dipekerjakan sebagai buruh untuk pabrik-pabrik Jepang. Pasca penjajahan Jepang, infrastruktur-infrastruktur yang ditinggalkan Jepang merupakan salah satu faktor yang mendukung Korea Selatan untuk mengembangkan bidang industrinya.

Masuknya kekuatan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II untuk menangkal masuknya pengaruh komunis sangat membantu Korea Selatan dalam memperoleh bantuan dana dan perlindungan militer. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi pembangunan perekonomian Korea Selatan.

Park Chung Hee sebagai presiden ketiga Korea Selatan, telah meletakkan dasar kebijakan ekonomi, terutama bidang industry, yang membawa Korea Selatan pada masa keemasan ekonominya. Berdasarkan analisis di bab sebelumnya, Park Chung Hee mengatur negara dengan sistem otoriter, termasuk dalam membuat kebijakan ekonomi. Semua pelaksana ekonomi seperti pengusaha dan kementrian terkait melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah dan langsung berada di bawah pengawasan Park Chung Hee, bahkan Presiden Park sering turun langsung dalam memutuskan masalah perekonomian negara.

Merujuk pada pembahasan bab sebelumnya menunjukkan bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi Korea Selatan terletak pada kemampuan manusianya, terutama pada pemimpinnya berkaitan dengan strategi kebijakan yang dijalkannya. Pemerintah Korea Selatan menyadari pentingnya industri dasar yang akan menjadi katalis bagi berkembangnya industri hilir lainnya.

Ada beberapa kebijakan penting yang dilakukan selama Park Chung Hee menampuk kursi pimpinan Korea Selatan. Kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Park Chung Hee bertujuan untuk mengembangkan industrialisasi untuk membangkitkan perekonomian Korea Selatan yang sempat terpuruk.

Kebijakan ekonomi Park Chung Hee yang pertama adalah kebijakan *Export-Oriented Industrialization* (EOI) yang mengubah Korea Selatan dari industrialisasi substansi impor ke industri berorientasi ekspor. Adanya pengurangan bantuan dana dari Amerika Serikat setelah Perang Korea (1950-1953) membuat Korea Selatan memberlakukan kebijakan ini untuk memperoleh devisa yang lebih besar. Selain itu, rendahnya daya beli masyarakat juga menjadi

alasan utama dilaksanakan kebijakan ini. Melalui kebijakan ini, pemerintah Korea Selatan berhasil meningkatkan angka devisanya dan mengembangkan perindustrian yang selanjutnya mengurangi angka pengangguran di Korea Selatan.

Kebijakan kedua, yaitu *Economic Planning Board* (EPB) yang dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama dan kedua diarahkan untuk pembangunan industri, tahap ketiga untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, dan tahap keempat untuk pembangunan ekonomi yang mandiri dan pemerataan hasil pembangunan. EPB mencanangkan target-target untuk semua variabel ekonomi terpenting termasuk investasi, konsumsi, tabungan, tingkatan-tingkatan *output*, impor dan ekspor, serta alokasi-alokasi terinci oleh sektor-sektor industri. Selain itu juga berwenang dalam mengubah pajak, tarif, subsidi, tarif keperluan-keperluan umum, mengontrol harga barang-barang tertentu, dan juga mengubah lisensi-lisensi impor, lisensi-lisensi investasi, penggunaan devisa, dan lisensi-lisensi pendirian usaha baru. Selain itu, EBD mempermudah pemerintah, terutama presiden, dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jalannya perindustrian.

Kebijakan terakhir yaitu kebijakan *Heavy Chemical Industry* (HCI) yang pada masa ini terjadi perubahan orientasi industri dari industri ringan ke industri berat. Terjadi pembatasan masuknya barang-barang impor ke beberapa negara menyebabkan barang-barang ekspor Korea Selatan kehilangan pasar. Situasi ini akhirnya mendorong pemerintahan Park untuk lebih memberikan prioritas pada perkembangan industri berat dan kimia, seperti pembuatan kapal, industri permesinan, baja, mobil, dan petro kimia. Rencana pembangunan industri berat dan kimia merupakan usaha Korea Selatan untuk membuat kekuatan industrinya

lebih mandiri. Walaupun pada awal pembangunan industri berat dan kimia ini, kemampuan Korea Selatan sempat diragukan oleh Bank Dunia sebagai penyedia dana pinjaman luar negeri. Syarat-syarat dan hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha yang bergerak di bidang industri berat dan kimia mendorong keberhasilan industri Korea Selatan. Kebijakan-kebijakan di atas kemudian membawa Korea Selatan menjadi salah satu negara yang disebut '*Four Tigers* (Empat Macan)' karena berhasil mencapai tingkat pertumbuhan tahunan (*annual growth*) sebesar 5,5% dan lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya di dunia.

Park Chung Hee telah berhasil membuktikan bahwa sumber daya alam tidak menjadi penentu utama dalam mencapai kemajuan ekonomi suatu bangsa. Sistem pemerintahan dan kebijakan-kebijakan Park Chung Hee yang memberikan bentuk dasar bagi perekonomian Korea Selatan membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mampu memperbaiki perekonomian dan memajukan kesejahteraan rakyat. Kebijakan Park Chung Hee pun menjadi dasar kesuksesan ekonomi dan industri di Korea Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amsden, Alice. H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. New York: Oxford University Press.
- Anderson, Benedict, (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso
- Baker, Don. (2008). *Korean Spirituality*. Honolulu : University of Hawai'i Press.
- Cardoso, Fernando Henrique. (1977). *The Consumption Dependency Theory in The United States* dalam Latin American Research Review.
- Castley, Robert. (1997). *Korea's Economic Miracle: the Crucial Role of Japan*. New York: Macmillan Press.
- Chang, Sea-jin. (2003). *Financial Crisis and Transformation Korean Business Group : The Rise and Fall of Chaebol*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Chon, In-kwon. (2006). *Park Chung Hee Commentaries: A Biographical Study of His Political Thought and Behavior*. Seoul: Ihaksa.
- Chong, Un-hyon. (2004). *A Chronicle of the Soldier Park Chung Hee*. Seoul: Kaemagowö
- Chong, Yong-jin. (1997). *Young man Park Chung Hee: A Biographical Novel, vol. 1*. Seoul: Liburo.
- Chu, Chi-ho. (2005). *Novel Park Chung Hee, vol. 1 and vol. 2*. Seoul: Chagün kinamu.

Cumings, Meredith Woo. (1999). *The Developmental State*. London: Cornell University Press.

Evans, Peter B. (1979). *Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil*. New jersey: Princeton University Press.

Grossman, Gregory. (2004). *Sistem-sistem Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hadiwinata, Sugeng Bob. (2002). *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanesusius.

한 영 우 (Han, Young Woo). (2003). *다시 찾는 우리 역사 (Menyelusuri Kembali Sejarah Kita)* Seoul: Gyongsaewon.

Han, Sang-bom. (2001). *Summon Park Chung Hee to a Historical Court*. Seoul: P'urunesang

Han, Sung-jo. (1999). *Park Chung Hee Boom, Is This Accidental or Necessary?*. Seoul: Malkwach'angjosa.

Hughes, Helen. (1992). *Keberhasilan Industrialisasi Di Asia Timur*. Jakarta: Gramedia.

Hundt, David. *Reappraising the Developmental State*. Dalam perkuliahan Deakin University, Melbourne.

International Monetary Fund. *Economic Growth Rates of Advanced Economies*. 2010-09-08

Irwan, Alexander. (1989). *Kenaikan Upah Riil Pada Sektor Pengolahan Di Korea Selatan*. Prisma No.8, Tahun XVIII.LP3S.

Kang, Hildi. (20010). *Under The Black Umbrella: Voices From Colonial Korea, 1910-1945*.USA: Cornell University Press.

- Kang, Myun Hun. (1966). *The Korean Business Conglomerate: Chaebol The and Now*. Berkeley: Institute of East Asian Studies University of California Press.
- Kim, Eun-mee. (1988). *From Dominance to Symbiosis: State and Chaebol Korea*. dalam Pasific Focus III (2): 105-121.
- Kim, Myung Oak dan Jaffe, Sam. (2010). *The New Korea An Inside Look At South Korea's Economic Rise*. United State of Amerika : Amacom.
- 김형아 (Kim, Hyung-A). (2004). *박정희의 양날의 선택: 유신과 중화학 공업* (*Korea's Development Under Park Chung Hee: Rapid industrialization, 1961-1979*). London: Routledge.
- Kim Youn-hyung. (1991). *Economic Depelopment In The Republic of Korea: A Policy Persfective*. Honolulu: University of Hawai Press.
- Korea Overseas informatn Service. (2008). *Fakta-fakta Tentang Korea*. Seoul: Pelayanan kebudayaan dan Informasi Korea.
- Krueger, Anne O. (1979). *The Development Role of The Foreign Sector and Aid*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kuntjoro Jakti, Hero Utomo. (1995). *Ekonomi Politik Internasional di Asia Pasifik*. Jakarta: Erlangga.
- Kwon, Seung-ho dan O'Donell, Michael. (2001) . *The Chaecol and Labour in Korea*. London : Routledge.
- Lee, Yeon-ho.(1997) . *The Stat, Society, and Big Business in South Korea*. New York: Routledge.
- Luthans, Fred. (1998). *Organizational Behavior*. New York: Irwin/McGraw-Hill.

- McNamara, Dennis L. (1990). *The Colonial Origins of Korean Interprise*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mas'oed, Mohtar dan Yang Seung-yoon. (2003). Politik, Ekonomi, Masyarakat Korea : Pokok-pokok Kepentingan dan Permasalahannya. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A.N. (1965). *Korea Baru Negeri Kuda Sembrani: Laporan dan Kisah Bangkitnya Suatu Bangsa*. Jakarta: Yayasan Dwikarya
- Rhee, Yung-whee. (1984). *Korea's Competitive Edge*. Maryland: The John Hopkins Univ. Press.
- Shik, Chang Yung dan lee, Steven Hugh. (2006). *Transformation An Twentieth Century Korea*. New York : Routledge.
- Song, Byung-nak. (1997). *The Rise of The Korean Economy*. New York: Oxford University Press.
- Wade, Robert. (1990). *Governing The Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*. New Jersey: Princenton University Press.
- Winanti, Poppy S. (2003). *Developmental State dan Tantangan Globalisasi: Pengalaman Korea Selatan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.7 No.2
- Winarno, Budi. (2009). *Pertarungan Negara Vs Pasar*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Woronoff, Jon. (1983). *Korea's Economy: Man-Made Miracle*. Seoul: The Si-sa-yong-0-sa Publishers.
- Yi, Su-kwang. (2005). *Novel Human Being Park Chung Hee*. Seoul: Gloria.

Yo, Han-jong. (1989). *Sejarah Ringkas Ekonomi Korea Periode Rekonstruksi (1953-1961)*. Korea Jurnal, Vol. 1, No. 1.

Young, James V. (2003). *Eye on Korea: An Insider Account of Korean-American Relations*. Texas : Texas A and M University Press.

윤 영 만 (Yoon, Yeong Man). (2005). *한국의 경제정책 (Kebijakan Perekonomian Korea)*. Seoul: Pakyoungsa.

BUKU ONLINE

Kang, Hildi. (2010). *Under The Black Umbrella: Voices From Colonial Korea, 1910-1945*. USA: Cornell University Press.

<http://books.google.co.id/books?id=MBMBnWHZhIcC&printsec=frontcover&dq=Under+the+Black+Umbrella:+Voices+from+Colonial+Korea,+1910-1945&cd=1#v=onepage&q&f=false>.

이 병 천, (Lee, Byeong-cheon). (2003). *개발 독재 와 박 정희 시대: 우리 시대의 정치 경제적 기원 (Developmental Dictatorship and the Park Chung-Hee Era)*. New Jersey: Homa & Seley Books.

http://books.google.co.id/books?id=IQdg8OXfUkEC&printsec=frontcover&dq=Developmental+Dictatorship+and+the+Park+Chung-Hee+Era&hl=id&ei=kp8fTomTMevymAXIsuCvAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false.

Mason, Edward Sagendorph. (1980). *The Economic and Social Modernization of The Republic of Korea*. Harvard College.

http://books.google.co.id/books?id=2_xWg5FpzDAC&printsec=frontcover&dq=mason+1980&hl=id&ei=JaQfTrC6H6qemQX93YtAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false.

SUMBER INTERNET

Dwitri Waluyo,s GATRA- “Chaebol Berpayung Pejabat”,
<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/05/10/0024.html> (1 Maret 2011, pk. 16.17).

Gregg, Donald. “Park Chung Hee”, <http://time.com> (21 Maret 2011, pk. 23.57).

Enciclopaedia Britanica Online, “Kim Jae Kyu”, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/317891/Kim-Jae-Kyu> (13 Mei 2011, pk. 20.11).

Mulyanto, “Samsung dan Icarus ‘syndrome’”,
<http://imambudiraharjo.wordpress.com/2009/12/22/samsung-dan-icarus-syndrome/> (1 Mei 2011, pk. 13. 20)

Enciclopaedia Britanica Online , “Park Chung Hee”, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/444035/Park-Chung-Hee> (13 Mei 2011, pk.20.09).